

KEPENTINGAN NASIONAL IRAN DALAM *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) TAHUN 2015-2017*

(Skripsi)

Oleh

ARIF RAMADHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Kepentingan Nasional Iran dalam Kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* Tahun 2015-2017

Oleh

Arif Ramadhan

Kebijakan Iran untuk menyepakati kesepakatan nuklir damai *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada tahun 2015 tentu memiliki beberapa pertimbangan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan yang dimiliki dalam kesepakatan tersebut. Kemudian penulis merumuskan permasalahan yakni bagaimana kepentingan Iran menyepakati JCPOA. Dengan menggunakan metode penelitian dekripsi kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Serta teknik analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mengacu pada teori kebijakan luar negeri model adaptif Rosenau dan konsep kepentingan nasional Donald.E Nuechterlein. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan pemerintah Iran untuk menyepakati JCPOA ialah dilandaskan pada kondisi internal, eksternal, maupun pemimpin. Kemudian untuk kepentingan yang dimiliki oleh Iran dalam JCPOA ialah pada bidang perekonomian, bidang pertahanan, dan bidang ideologi. Pada bidang perekonomian, keringanan sanksi yang diberikan oleh negara yang terlibat dalam JCPOA berdampak pada peningkatan perekonomian Iran. Pada bidang pertahanan, tidak adanya peraturan mengenai rudal balistik dalam JCPOA dimanfaatkan Iran untuk mengembangkannya lebih besar. Pada bidang ideologi, nilai-nilai anti-amerika yang sudah ada sejak revolusi 1979 semakin diperkuat dengan adanya JCPOA. Apabila melihat hasil penelitian ini maka penulis memiliki beberapa saran antara lain, pemerintah Iran mengantisipasi kemungkinan negara yang terlibat dalam JCPOA menarik diri, mengurangi ketergantungan sumber daya minyak dan memaksimalkan sumber daya lain, dan memaksimalkan *research and development* dibidang energi nuklir.

Kata kunci : Kepentingan Nasional, Iran, P5+1, Nuklir, JCPOA.

ABSTRACT

Iran's National Interest on *Joint Comprehensive Plan of Action* Period 2015 - 2017

By

Arif Ramadhan

Iran's policy to agree on a peaceful nuclear agreement the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015 certainly has some considerations. Based on this, this study aims to determine the interests held in the agreement. Then the writer formulates the problem namely how Iranian interests agree on the JCPOA. By using descriptive qualitative research methods and using data collection techniques in the form of literature studies. As well as analytical techniques with data reduction, data presentation and conclusion drawing. Referring to the foreign policy theory of Rosenau's adaptive model and Donald.E Nuechterlein's concept of national importance and using triangulation analysis techniques. The result of this research is that the decision of the Iranian government to agree to the JCPOA is based on internal, external and leadership conditions. Then for the interests held by Iran in the JCPOA is in the economic sector, the defense field, and the ideology field. In the economic field, the relief of sanctions imposed by countries involved in the JCPOA has an impact on improving the Iranian economy. In the field of defense, the absence of regulations regarding ballistic missiles in the JCPOA was used by Iran to develop it more. In the field of ideology, anti-American values that have existed since the 1979 revolution were further strengthened by the existence of the JCPOA. When looking at the results of this study, the authors have some suggestions, among others, that the Iranian government anticipates the possibility of countries involved in JCPOA withdrawing, reducing dependence on oil resources and maximizing other resources, and maximizing research and development in the field of nuclear energy.

Keywords : National Interest, Iran, P5+1, Nuclear, JCPOA

**KEPENTINGAN NASIONAL IRAN DALAM *JOINT
COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)* TAHUN 2015-
2017**

Oleh

ARIF RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hubungan Internasional**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul : **KEPENTINGAN NASIONAL IRAN DALAM
JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION
(JCPOA) TAHUN 2015-2017**

Nama Mahasiswa : **Arif Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa : **1516071077**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H
NIP. 19570728 198703 1 006

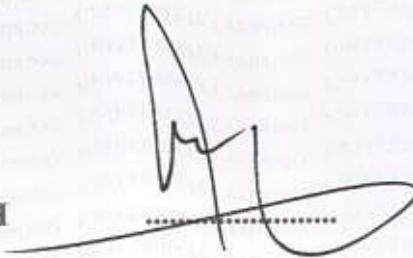
Indra Java Wiranata, S.I.P., M.A
NIK. 231704921219101

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

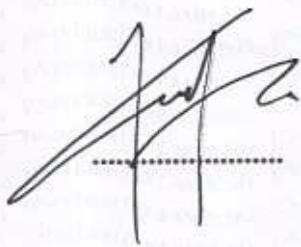
Dr. Ari Darmastuti, M.A
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

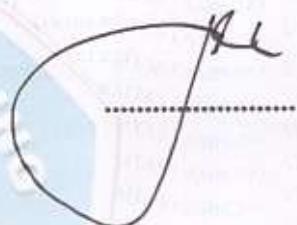
1. Tim Pengaji
Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H**



Sekretaris : **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A**



Pengaji : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 09 Oktober 2019



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: http://hi.fisip.unila.ac.id/

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Arif Ramadhan. Lahir di Braja Sakti, Way Jepara, pada 29 Januari 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buat hati Bapak Imam Basori dan Ibu Siti Munawaroh.

Pendidikan formal yang pernah di tempuh penulis adalah Taman Kanak-Kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Braja Sakti Lampung Timur dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1

Braja Sakti Lampung Timur sampai tahun 2009. Kemudian menempuh pendidikan formal selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Way Jepara Lampung Timur pada tahun 2009-2012 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Way Jepara Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur seleksi mandiri (UM). Selama aktif menjadi mahasiswa penulis aktif dibeberapa kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional maupun Unit Kegiatan Mahasiswa. Penulis pernah mengikuti organisasi tingkat universitas yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U), Social and Political English Club (SPEC) menjabat sebagai Ketua Divisi Public Relation pada tahun kepengurusan 2017.

Selain itu penulis aktif dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (FKMHII) dan mengikuti lima kali Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia antara lain PSNMHII Universitas Jenderal Ahmad Yani, PNMHII

Universitas Pasundan, PNMHII Universitas Jenderal Soedirman, PSNMHII Universitas Mulawarman, PNMHII Universitas Islam Indonesia. Pada saat Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Soial dan Ilmu Politik Universitas Lampung mendapatkan amanah menjadi tuan rumah PSNMII, penulis turut serta dalam kepanitiaan *Liasion Officer* (LO). Penulis juga mendapatkan amanah sebagai Presidium Nasional Koordinasi Wilayah 1 periode 2018-2019

MOTTO

Appear weak when you are strong, and strong when you are weak" Sun Tzu

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui" QS Al Baqarah : 216

"You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it." Lionel Messi

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur
kupersembahkan karya sederhana ini untuk

Kedua Orang Tuaku
Bapak Imam Basori dan Ibu Siti Munawaroh
Yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnya
dan tak lupa selalu mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya

Adikku Kamila Zaskia Dewi dan Ali Rahmat Wirayuda

Keluarga Besar HR Putra

Keluarga Besar Forum Komunikasi Mahasiswa Jurusan Hubungan
Internasional se-Indonesia (FKMHII)

serta Almamater tercinta **Universitas Lampung**,
Tempatku mengenal warna baru dan bermetamorfosa

SANWACANA

Alhamdulillahirabil' alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepentingan Nasional Iran dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) tahun 2015-2017” ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan membawa manusia dari masa jahiliyah ke zaman penuh kemajuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang sangat bijaksana dan yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis dari awal mahasiswa baru hingga studi selesai. Banyak pengalaman hidup yang penulis dapatkan dari Pak Aman, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.

4. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Kedua atas motivasi, waktu, dan pesan-pesan selama masa bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembahas / Penguji yang senantiasa sabar memberikan bimbingan dan masukan dalam setiap proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Imam Basori dan Ibunda Siti Munawaroh yang selalu menjadi panutan, semangat, dan mencerahkan kasih sayang setiap saat. Tentu banyak perbuatan, sikap, dan perkataan yang menyinggung perasaan dan membuat kecewa orang tua tercinta. Penulis sangat terharu atas perjuangan dan doa-doa sehingga dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang tepat.
7. Kedua Adik tersayang Ali Rahmat Wirayuda dan Kamila Zaskia Dewi . Dengan kehadiran kalian berdua, memotivasi Mas Arif untuk menjadi pribadi yang selalu bekerja keras, semangat menjalani hidup, dan membahagiakan keluarga.
8. Seluruh Jajaran Dosen dan Staff Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Bu Ari, Mas Gara, Mas Hasbi, Mas Tyo, Mas Indra, Mas Nizar, Mba Tiwi, Mba Atta, Mba Pipit, Mba Gita Djausal, Mba Tety, Mas Fredrik, Mba Nisa, Mba Ayu, dan Mba Febri. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan baik akademik maupun akademik. Segala bantuan maupun pengalaman yang diberikan kepada penulis dari masa mahasiswa baru hingga studi selesai.
9. Windy Sevia Wulandary sebagai teman yang selalu mendukung dan mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih atas segala waktu, saran, dan kasih sayang yang selalu diberikan dari awal penyusunan skripsi hingga selesai. Teruslah menjadi pribadi yang baik, penyayang, dan menemani penulis dalam setiap kondisi.
10. Teman-teman ‘Ich Bin Brother’ Bang Wahid, Kiyay Firly, Jendral Alfredo selaku sahabat seperjuangan yang memotivasi, memberikan pelajaran dan pengalaman hidup selama masa perkuliahan.

11. Para suhu jurusan Hubungan Internasional, Bang I Wayan Sulpai, Bang Chan, Bang Reza, Bang Banu, Kak Deya, Kak Tia Panca, Kak Hani, Kak Saka, Bang Meka, Kak Dimas, Kak Nisrina, Bang Derik, Bang Wira, Bang Ivan, Bang Arya, Kak Arum, Bang Supran.
12. Teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2015 Chaindra Adityas R, S.Hub.Int. Fitrah Jaya, Geraldo, Prajody Y, Aay, Anissa Fernanda S.N, Azizul Kohar, , Angki, Hizkia, Eva, Albin, Eno Widiarti, Anindya Nur R, Hana , Donna, Hani, Galih, Khansa, Sarah, Hayu, Hasya, Clara, Firstya, Regiana, Devita, Fijar, Gio, Fajar, Billgart, Revih, Anya, Wita, Saleh, Ulul, Dudit, Christine, Imel, Boni, Dinda, Riris, Nova Bella, Aditya Pratama.
13. Teman-Teman seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2016 Malebi, Putu, Pio Dasmara, Suci Elvionita G, Ananda Saskia, Diar, Aldo, Yoga, Rahajeng, Andra, Farhan, Maul, Dhaniel, Nabila, Rona, Risa
14. Teman-Teman seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2017 Amanda, Nahwa, Ezra, Dinda, Indah, Nindy, Nanda, Ninda, Agung, Devi, Lina, Fisko, Sutan, Trima, Dhani.
15. Seluruh teman-teman Strata-1 Hubungan Internasional angkatan 2015 hingga 2019 tanpa terkecuali. Tetap semangat, sukses selalu dalam menjalankan dunia perkuliahan dan selalu menjaga nama baik jurusan hubungan internasional serta himpunan mahasiswa jurusan hubungan internasional
16. Para Presidium Nasional FKMII periode 2018-2019, Pres Muhammad Wicaksono, Pres Reza Pahlevi, Pres Kenny Meigar, Pres Zaquia Husein Bachraq, dan Pres Harun
17. Teman-teman KKN Tematik Universitas Lampung Periode Juli Tahun 2018, yaitu Regina, Aulia, Reza, Puspita, Dwi, dan Stefany. Terimakasih atas pengalaman dan pelajaran hidup selama kurang lebih 32 hari. See you on top guys, selalu berbenah menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.
18. Seluruh Ketua Himpunan Jurusan Hubungan Internasional Koorwil 1 FKMII, Rakha, Habib, Suci, Dika, Agung.

19. Teman-teman seperjuangan FKMHII, Chensy, Dymas Ilham, Baldi, Kak Nindy Belly, Bang Agung Wisandi, Khegie Pamay, Alya, Agit, Ledy, Yoga, Bella, Kak Aghnia, Adhit Prayoga, Lidya Wahyu, Evan, Kak Patriyan Rizki, Kak Fakhri.
20. Anggota Komunitas ARSA Lampung generasi pertama, Cici, Anggia, Dewi Sundari, Mbak Inggit, Kurniawan Handi P, Kelvin Pranata
21. Teruntuk pihak-pihak yang berjasa dalam kehidupan menulis dan mungkin penulis lupa menyebutkannya. Berbuatlah baik dan menjadi pendengar terbaik bagi setiap orang yang menyayangi kalian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebaikan atas segala dedikasi dan pengalaman yang telah kalian berikan kepada penulis. Besar harapan penulis apabila dikemudian hari terdapat peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini maka dapat melengkapi kekurangannya.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2019

Penulis,

Arif Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kerangka Analitis	17
2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri	17
2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional	21
2.4. Kerangka Pemikiran	26
III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Tipe Penelitian	27
3.2. Fokus Penelitian	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Teknik Analisa Data	30
IV. GAMBARAN UMUM	32

4.1 Sejarah Peradaban Iran.....	32
4.1.1 Sejarah Peradaban Iran.....	32
4.2 Program Nuklir Iran	53
4.2.1 Awal Perkembangan Nuklir Iran	53
4.2.2 Kebijakan Program Nuklir Pasca Revolusi 1979.....	57
4.3 Kesepakatan <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA)	63
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	69
5.1 Kebijakan Luar Negeri Iran dalam <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA) tahun 2015	69
5.1.1 <i>Structural Change</i> : Kondisi Internal Iran pada masa awal pemerintahan Hassan Rouhani.....	72
5.1.2 <i>External Change</i> : Kondisi Eksternal Iran pada masa awal awal pemerintahan Hassan Rouhani	74
5.1.3 <i>Leadership</i> : Gaya Kepemimpinan Hassan Rouhani	77
5.1.4 Analisis Hasil Kebijakan Luar Negeri Iran menyepakati <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA).....	79
5.2. Analisis Kepentingan Nasional Iran dalam <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA)	82
5.2.1 <i>Economic Interest</i>	83
5.2.2 <i>Defence Interest</i>	88
5.2.3 <i>Ideological Interest</i>	92
VI. PENUTUP	95
6.1 Kesimpulan	95
6.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 5.1. Daftar Rudal Balistik Iran	87
Tabel 5.2. Peringkat Iklim Bisnis Iran di Dunia	89

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peta Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Timur Tengah.....	3
Gambar 2.1 Model Adaptif Politik Luar Negeri.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.3 Cadangan Minyak Dunia	54
Gambar 5.1 Grafik Ujicoba Rudal Balistik Iran	92

DAFTAR SINGKATAN

AEOI	:	<i>Atomic Energy Organization of Iran</i>
CISADA	:	<i>Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of</i>
IRCGC	:	<i>Islamic Revolutionary Guard Corps</i>
EU	:	<i>European Union</i>
HEU	:	<i>Highly Enriched Uranium</i>
IAEA	:	<i>International Atomic Energy Agency</i>
ICBMs	:	<i>Intercontinental Ballistic Missiles</i>
ILSA	:	<i>Iran-Libya Sanction Act</i>
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
INVAP	:	<i>Argentine National Institute for Applied Research, Investigaciones Aplicadas</i>
JCPOA	:	<i>Joint Comprehensive Plan Of Action</i>
JPA	:	<i>Joint Plan of Action</i>
LEU	:	<i>Low Enriched Uranium</i>
MNSR	:	<i>Miniature Neutron Source Reactor</i>
MRBMs	:	<i>Medium Range Ballistic Missiles</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan persenjataan nuklir mulai diketahui oleh komunitas internasional saat peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 oleh Amerika Serikat. Peristiwa tersebut menyebabkan kekhawatiran komunitas internasional terhadap dampak senjata nuklir. Perkembangan nuklir sejak awal keberadaanya diinisiasi tidak hanya Amerika Serikat melainkan negara superpower lainnya yaitu Uni Soviet, beberapa kali uji coba nuklir yang dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 1950-an dengan menggunakan ratusan bom hidrogen.¹

Sejak saat itu kepemilikan energi nuklir suatu negara menyebabkan dualisme pandangan bagi komunitas internasional karena dapat menjadi ancaman, satu sisi negara pemilik nuklir menyatakan bahwa keberadaan nuklir untuk tujuan damai serta digunakan sebagai energi namun disisi lain memungkinkan untuk mengembangkan nuklir sebagai persenjataan. Keberadaan persenjataan nuklir masih terus berkembang hingga saat ini mengingat kondisi internasional yang dinamis dan anggapan bahwa nuklir dapat dijadikan *deterrence*. Senjata nuklir dianggap senjata paling berbahaya didunia karena berdampak sangat luas, kurang

¹ Colin S.Gray.1999.*The Second Nuclear Age*. Lynne Rienner Publisher, Inc. Hlm.7

lebih ada 14.500 persenjataan nuklir didunia. dan dari jumlah tersebut total 2.000 sedang dilakukan uji coba hingga saat ini.² Tidak semua negara didunia internasional memiliki nuklir, hanya ada beberapa negara yang memiliki nuklir yaitu Negara P5 (Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Perancis), dan negara-negara di luar P5 (Korea Utara, Israel, India, Pakistan). Melalui pengakuan dunia internasional mengenai status Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang dunia kedua yang menyebabkan negara tersebut memiliki hak untuk mengatur keamanan dunia, termasuk membatasi pengembangan energi nuklir dan penggunaan nuklir sebagai senjata.

Kesadaran komunitas internasional akan bahaya dari energi nuklir terutama pengembangan untuk persenjataan, dan kuantitas kepemilikan nuklir dari negara-negara semakin banyak maka atas dasar itu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah Badan Atom Internasional yaitu *International Atomic Energy Agency* (IAEA). IAEA dibentuk pada tahun 1957 sebagai badan yang mengawasi perkembangan dan potensi pengembangan negara-negara pemilik nuklir.

Selain itu terdapat beberapa jenis lain traktat, perjanjian, hukum, perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang dinamakan dengan rezim non-proliferasi nuklir. Adapun bentuk-bentuk rezim itu antara lain *the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), *the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests In The Atmosphere, In Outer Space And Under Water, also known as the Partial Test Ban Treaty* (PTBT), *the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT), *Nuclear Weapon Free Zones* (NWFZ).³

² United Nations Office For Disarmament Affairs. *Nuclear Weapon*. Diakses melalui <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/>, pada 21 Oktober 2019.

³ Ibid.,

Peningkatakan kapabilitas nuklir di kawasan Timur Tengah dipengaruhi oleh keberadaan pembangkit reaktor nuklir di berbagai negara baik yang baru akan direncanakan, sedang dilakukan konstruksi, dan sudah beroperasi. Iran memiliki satu reaktor nuklir yang sudah beroperasi yaitu Bushehr I dan satu reaktor nuklir sedang dalam konstruksi yaitu Bushehr II. Keberadaan pembangkit reaktor nuklir pada negara lain sedang dalam tahap perencanaan dan konstruksi seperti Jordania, UAE, Turkey.



Gambar 1.1 : Peta Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Timur Tengah

Sumber : U.S Energy Information Administration diakses dari

<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=35192>

Iran merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang mendapatkan sumber daya nuklir atas bantuan dari Amerika Serikat melalui program *Atoms For Peace* pada 1967 di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi. Amerika Serikat melihat Shah Reza Pahlevi merupakan sosok pemimpin yang anti-komunis, sehingga dapat dijadikan penyeimbang presensi pengaruh Uni Soviet dan gerakan rezim Arab pro-Soviet. Program tersebut memberikan keuntungan bagi Iran karena Saat memasuki tahun 1970 Iran mulai meratifikasi NPT (Non-

Proliferation Treaty)⁴, dengan begitu maka program nuklirnya memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi. Pada tahun 1974 Iran berada dibawah pengawasan menyeluruh oleh Badan Atom Internasional (IAEA).

Revolusi Iran 1979 menjadi salah satu peristiwa besar bagi masyarakat Iran. Pemimpin Iran kala itu Shah Reza Pahlevi digantikan oleh tokoh revolusioner Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pada masa ini terjadi perubahan arah kebijakan luar negeri Iran pasca revolusi termasuk program pengembangan nuklir. Khomeini menilai bahwa proyek nuklir merupakan hasil dari kerjasama Amerika Serikat dan akan menghabiskan anggaran negara. Dengan demikian dibawah rezim Khomeini Iran mengehentikan sementara program nuklirnya. Saat terjadi perang Irak-Iran 1980-1988, Iran tidak mampu mengimbangi kapabilitas militer Irak. Karena pada saat itu Irak menggunakan teknologi persenjataan mutakhir seperti rudal balistik. Khomeini mulai mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan pengembangan program nuklirnya yang telah dimulai sejak rezim Shah.

Perkembangan program nukir Iran mengalami kemajuan saat keputusan presiden kala itu Rafsanjani mengembangkan kembali nuklir tahun 1995, dan pada masa tersebut negara ini menjadi pusat perhatian dunia internasional atas inisiasi pengembangan teknologi nuklir yang lebih mutakhir. Saat masa Pemerintahan Rafsanjani mulai melakukan langkah nyata melanjutkan kembali pengembangan teknologi nuklir yakni kerjasama dengan Rusia, Tiongkok, dan Pakistan.⁵ Saat

⁴ NPT (*Non-Proliferation Treaty*) merupakan sebuah perjanjian internasional yang cukup penting dengan tujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mempromosikan kerjasama perdamaian, penggunaan energi nuklir damai, dan tujuan akhirnya untuk melucuti senjata nuklir. Disadur melalui <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>, pada 22 Oktober 2018

⁵ Iran Watch. 2016. A History of Iran's Nuclear Program. Diakses melalui <https://wwwiranwatch.org/our-publications/weapon-program-background-report/history-irans-nuclear-program>, pada 23 Oktober 2018

memasuki tahun 2002 oposisi Pemerintah melaporkan kepada IAEA bahwa terdapat fasilitas nuklir yang disembunyikan oleh Pemerintah Iran di wilayah Arak dan pengayaan uranium di Natanz. IAEA sebagai badan pengawas atom internasional melakukan inspeksi ke Iran, temuan di lapangan IAEA menyatakan bahwa Iran melanggar NPT.⁶

Pasca inspeksi oleh IAEA, diharapkan Pemerintah Iran lebih terbuka atas informasi pengayaan uranium di Natanz, sepakat untuk menghentikan kegiatan pengembangan nuklirnya, menghentikan manufaktur dan perakitan bagian-bagian sentrifugal pada fasilitas pengayaan uranium. Selanjutnya, saat Mahmoud Ahmadinejad terpilih menjadi Presiden pada tahun 2005, Iran mulai tidak berkomitmen dengan perjanjian kerjasama IAEA. Mahmoud Ahmadinejad merupakan seorang tokoh konservatif yang menentang keras kebijakan sanksi oleh negara-negara Barat, hingga akhirnya 10 Januari 2006 ia mengeluarkan kebijakan melepaskan segel larangan melanjutkan pengembangan fasilitas pengayaan uranium didaerah Natanz.⁷ Perubahan sikap kebijakan luar negeri Iran dapat dipahami akibat dari pengaruh ideologi yang dimiliki oleh Mahmoud Ahmadinejad.

Sanksi yang diberikan kepada Iran tidak hanya aspek ekonomi saja, tetapi pada tahun 2006 Pemerintah Amerika Serikat melancarkan serangan *cyber* oleh George W Bush berupa ‘Stuxnet’ pada tahun 2006. Pada akhirnya kredibilitas dan posisi Pemerintah Iran dipengaruhi oleh hasil melindungi program nuklirnya, dan

⁶ Ted,R, Alia, C. 2018. *Major Milestones of Iran’s Nuclear Programme*. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/05/major-milestones-iran-nuclear-programme-180508105047809.html>, pada 24 Oktober 2018

⁷ Nuclear Threat Initiative. 2017. Natanz Enrichment Complex. Diakses melalui <https://www.nti.org/learn/facilities/170/>, pada 24 Oktober 2018

kebijakan-kebijakan Ahmadinejad yang cukup berani menentang negara-negara Barat untuk melanjutkan program nuklir Iran menyebabkan kritik dari lawan-lawannya.⁸

Iran memiliki beberapa fasilitas pengembangan nuklir antara lain reaktor nuklir untuk penelitian, fasilitas nuklir sipil, fasilitas nuklir militer, dan pengayaan uranium. Keberadaan beberapa fasilitas nuklir Iran terdapat di beberapa daerah, fasilitas nuklir untuk penelitian terletak di Teheran. Fasilitas nuklir sipil terletak di Arak, Qom, Bushehr, Natanz, Ishafan. Fasilitas nuklir militer terletak di daerah Parchin, dan pengayaan uranium terletak di daerah Saghand dan Gchine.

Perubahan kebijakan pengembangan program nuklir Iran terjadi sejak masa Hasan Rouhani terpilih menjadi presiden pada tahun 2013. Sikap yang dilakukan rezim Rouhani terkait permasalahan nuklir lebih transparan dibandingkan rezim-rezim sebelumnya. Hassan Rouhani memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan internasional mengenai program nuklir damai Iran dengan melakukan transparansi informasi fasilitas, reaktor nuklir, dan pengayaan uranium kepada dunia internasional. Upaya Hassan Rouhani untuk mendapatkan kepercayaan Internasional menemui titik terang. Pada masa ini negosiasi merupakan salah satu langkah yang sering digunakan Hassan Rouhani dalam memperbaiki hubungan Iran dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat. Proses memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat mencapai titik cerah saat Hillary Clinton mengundang Iran untuk hadir dalam konferensi di Afganistan dan Barack Obama

⁸ Wyn Bowen,dkk. 2016. Living On The Edge: Iran and the Practice of Nuclear Hedging. London. Palgrave Macmillian. Hlm.84

membuat sebuah video pada tahun 2009 yang berisi pesan mengajak Iran untuk membuka lembaran baru hubungan Amerika Serikat-Iran.⁹

JCPOA (Joint Comprehensive Plan Of Action merupakan bentuk perjanjian yang memperbaiki hubungan Amerika Serikat-Iran, yang telah dinegosiasikan sejak 14 Juli 2015 oleh negara P5 +1 dan Iran (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Tingkok, dan Jerman) untuk menggantikan perjanjian sementara nuklir yang telah dibuat sejak tahun 2014-2016. Adapun tujuan dari perjanjian ini yaitu memastikan bahwa program nuklir Iran digunakan dengan tujuan murni damai dan meminimalisir sanksi yang selama ini diberikan oleh AS, Uni Eropa, dan PBB terhadap Iran.¹⁰ JCPOA secara resmi berlaku sejak 18 Oktober 2015 dan mulai diimplementasikan oleh P5+1 pada 16 Januari 2016 dengan dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Iran dan Pemimpin negara P5+1 menegaskan bahwa JCPOA metode paling efektif untuk memastikan Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir serta mencegah pengembangan energi nuklir Iran untuk kepentingan persenjataan.¹¹ JCPOA berfokus pada program pengayaan Iran dan reaktor air beratnya saja karena dua hal tersebut dianggap sebagai bahan produksi senjata nuklir. Keberadaan dua fasilitas pengayaan sentrifugal gas yaitu *the Natanz Fuel Enrichment Plant and the Natanz Pilot Fuel Enrichment Plant* di Iran dianggap oleh negara-negara Barat

Hal yang cukup menarik bagi peneliti melihat perubahan arah kebijakan luar negeri Iran terkait program nuklir dari sikap konfrontatif menjadi sikap

⁹ Claudia, C. 2013. Obama's Policy Toward Iran: Comparing First and Second Term.

¹⁰ Paul K.Ker, Kenneth.K.2018. *Iran Nuclear Agreement and U.S Exit.* Congressional Research Service. Hlm.7

¹¹ Ibid., hlm. 34

berdiplomasi dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani. Kesepakatan tersebut benar-benar membatasi pengembangan nuklir Iran.

1.2 Rumusan Masalah

Kekuatan yang dimiliki oleh Iran dianggap oleh negara-negara Barat terutama Amerika Serikat sebagai ancaman di kawasan Timur Tengah. Kepemilikan sumber daya nuklir Iran menambah ancaman bagi negara-negara Barat. Oleh karena itu saat pengembangan nuklirnya, Iran mendapatkan berbagai tantangan seperti sanksi ekonomi, negosiasi perjanjian, hingga embargo ekonomi diinisiasi oleh Amerika Serikat. Selain itu pengembangan program nuklir Iran dipengaruhi oleh pemimpinnya, karena tidak semua pemimpin Iran yang merespon baik mengenai program nuklir. Atas dasar sanksi ekonomi dan propaganda yang menyudutkan Iran membuat dunia Internasional merasa prihatin dan khawatir akan kondisi Iran, oleh karena itu pada tahun 2015 negara P5+1 bersama dengan Iran membentuk perjanjian JCPOA (Joint Comprehensive Plan Of Action). Pada perjanjian ini mengatur hal-hal yang sekiranya dapat mencegah peningkatan kekuatan nuklir Iran untuk persenjataan dan meringankan embargo ekonomi oleh dunia internasional. Hal cukup mengejutkan ketika pasca seluruh negara termasuk Amerika Serikat yang sempat menolak menandatangani kesepakatan ini, hingga pada akhirnya seluruh negara menyepakati perjanjian tersebut pada tahun 2015. Jika ditelaah kesepakatan tersebut justru cukup merugikan bagi Iran dalam aspek program nuklirnya, tetapi membuka jalur perdagangan dengan dunia internasional akibat keringanan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merumuskan pertanyaan

penelitian “**Bagaimana kepentingan Iran dalam kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* ?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjadi arahan analisa lebih lanjut guna menjawab pertanyaan penelitian di atas. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis kepentingan nasional Iran *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada akhir penelitian ini, peneliti berharap kesimpulan yang diambil dari pertanyaan penelitian di atas memiliki kegunaan, terdapat dua kegunaan penelitian yakni kegunaan keilmuan dan praktis.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkuat teori-teori dalam hubungan internasional serta memperkaya wawasan akademisi hubungan internasional pada kajian kerjasama internasional, khususnya dalam bidang kebijakan luar negeri.

Kegunaan Praktis

Output dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah Iran dalam menentukan dan melihat posisi negara-negara lain dan negara Iran dimasa mendatang dalam kesepakatan JCPOA

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengharapkan dapat ditariknya suatu kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Keilmuan: Dapat menjadi bahan dasar dan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan melanjutkan atau memulai penelitian mengenai *Join Comprehensive Plan of Action* dan arah kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa Hassan Rouhani.
2. Manfaat Praktis: Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang memerlukan, khususnya mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengapa Iran dibawah Pemerintahan Hassan Rouhani menyepakati kesepakatan nuklir damai berupa *Joint Comprehensive Plan of Action*. Pada periode kepemimpinan sebelumnya Iran cukup keras merespon sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat. Untuk mendukung penelitian dan melihat dari sudut pandang berbeda mengenai tema ini, peneliti akan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah banyak dilakukan.

Penelitian pertama, oleh Lauren Cardinal yang merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Politik di Queen's University dengan judul *Domestic Factor in the Iranian Nuclear Agreement*. Dalam penelitiannya, berfokus kepada seberapa penting faktor domestik mempengaruhi kesepakatan JCPOA dan strategi keterlibatan Kanada. Cardinal menyatakan bahwa faktor domestik sebagai salah satu bagian dari persepsi ancaman, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan ancaman perkembangan persenjataan nuklir suatu negara dipengaruhi oleh Faktor eksternal. Kedua, jika Kanada memiliki sebuah kepentingan dalam kesepakatan nuklir Iran dapat memanfaatkan peluang yang dimiliki dalam kesepakatan nuklir dan berusaha menjalin kerjasama bilateral pada

aspek keamanan dan ekonomi dengan Presiden Iran saat ini yaitu Hassan Rouhani. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Cardinal terletak pada fokus. Penelitian Cardinal melihat bagaimana strategi Kanada dalam kesepakatan JCPOA, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada melihat semua aspek-aspek yang mempengaruhi Iran dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani menyepakati JCPOA. Dalam penggunaan kerangka teoritis dan konseptual tentu berbeda, karena dalam penelitian Cardinal menggunakan *national strategy*.

Penelitian kedua, oleh Sezgin Kaya dan Zeynep Şartepe yang merupakan Asistan Professor dan Asisten Peneliti jurusan Hubungan Internasional di Uludağ University dengan judul *Contentious Politics in Iran: Factions, Foreign Policy and Nuclear Deal*. Fokus dari penelitiannya yakni analisa evolusi kebijakan dari era revolusi hingga kesepakatan JCPOA yang memiliki harapan agar perkembangan nuklir Iran bersifat damai. Tujuan dari penelitiannya adalah mendeskripsikan mempertahankan keseimbangan antara ideologi dan pragmatisme, elemen-elemen perubahan, dan kontinuitas pelaksanaan kebijakan luar negeri Iran sejak Revolusi Islam 1979. Sezgin Kaya dan Zeynep Şartepe dalam penelitiannya menyatakan, perbedaan agenda yang diadopsi oleh masing-masing pemimpin Iran disebabkan oleh kondisi persaingan struktur politik, ekonomi, dan sosial negara. Ketegangan antara kelompok konservatif dan reformis akan mempengaruhi adopsi agenda kebijakan luar negeri dari masing-masing pemimpin Iran. Kesepakatan yang dicapai antara Iran dengan negara-negarat P5+1 menjadi catatan keberhasilan diplomatik sayap reformis dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian mereka menganalisa evolusi adopsi kebijakan luar

negeri Iran sejak Revolusi Iran hingga kesepakatan JCPOA dipengaruhi oleh ideologi sayap reformis dan konservatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupaya menganalisis aspek-aspek lain untuk mengetahui mengapa Iran menyepakati JCPOA. *Penelitian ketiga*, oleh Riezky Poetra Phoenna dan Harmiyati yang merupakan mahasiswi jurusan hubungan internasional di UPN Veteran Yogyakarta dengan judul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani. Fokus penelitiannya adalah melihat perubahan strategi dari konfrotatif pada masa Ahmadinejad menjadi moderat pada masa Hassan Rouhani. Riezky menganalisa perubahan strategi ini menggunakan konsep geopolitik dan *national power* dengan sembilan faktor antara lain geografis, potensi sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, populasi penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas Pemerintah.

Riezky dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketidakpercayaan negara-negara kepada perkembangan nuklir Iran untuk tujuan damai saat Ahmadinejad menjadi pemimpin, menyebabkan negara-negara Barat memberikan sanksi sehingga mengganggu stabilitas perekonomian Iran. Kondisi ini menjadi fokus perhatian dari Hassan Rouhani untuk memulihkan situasi perekonomian yang tidak stabil karena sanksi. Perubahan sikap Iran dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani dari konfrontatif menjadi moderat menjadi harapan baru bagi masyarakat Iran, normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat, dan keringanan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat akibat dari kesepakatan JCPOA. Jika penelitian Riezky lebih melihat pada aspek perubahan kebijakan dari Ahmadinejad menuju Hassan Rouhani untuk memperbaiki hubungan dengan negara Barat dan normalisasi

stabilitas perekonomian Iran. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan menganalisa aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi Iran menyepakati JCPOA.

Penelitian Keempat, oleh Amanda Rachmadianti yang merupakan mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jember dengan judul penelitian Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Amerika Serikat Mengenai Isu Nuklir pada masa Hassan Rouhani. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa setiap pemimpin suatu negara memiliki berbagai pertimbangan dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Seperti yang dilakukan Hassan Rouhani, ia lebih memilih menggunakan diplomatik dan negosiasi dalam instrumen kebijakan luar negerinya, tidak seperti Mahmoud Ahmadinejad yang mengedepankan kemandirian Iran dalam mengembangkan nuklir.

Sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat pada masa George W.Bush terhadap kebijakan kemandirian nuklir Iran pada masa Mahmoud Ahmadinejad menyebabkan stabilitas perekonomian Iran terganggu. Kondisi ini mulai membaik saat Amerika Serikat dipimpin oleh Barack Obama dan Iran dipimpin oleh Hassan Rouhani. Kedua pemimpin ini mengedepankan aspek negosiasi dan diplomasi, bahkan sampai kepada pembentukan rencana aksi bersama pada tahun 2013 berupa *Interim Agreement*. Faktor yang mempengaruhi Iran menyepakati *Interim Agreement* ini adalah konsekuensi pengurangan embargo ekonomi oleh negara-negara Barat, dengan ini Iran mulai diperbolehkan menjalin perdagangan internasional . Keuntungan yang didapat oleh Iran antara lain, mendapatkan kembali dana yang diblokir oleh Amerika Serikat pada masa Mahmoud Ahmadinejad, pengembangan transaksi minyak, petrokimia, logam mulia, dan industri kedirgantaraan. Kerangka konseptual dan teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *Neoclassical realism* dan konsep negosiasi-diplomasi. Efektivitas dari *Interim Agreement* menyebabkan diperlukannya kembali negosiasi agar perjanjian ini tidak hanya sementara melainkan jangka panjang. Selanjutnya perjanjian ini menjadi cikal bakal lahirnya *Joint Comprehensive Plan of Action*.

Meskipun dari keempat penelitian tersebut memiliki keselarasan tema, tetap terdapat perbedaan baik objek penelitian, teori yang digunakan, dan fokus penelitian. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya saling melengkapi satu sama lain dan peneliti berharap penelitian sebelumnya menjadi bahan pendamping saat akan melakukan penelitian. Untuk mempermudah proses pemahaman perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan akan disajikan tabel ringkasan.

~~bilateral~~ menjadi kesempatan besar untuk mencegah kapabilitas kekuatan

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3	Jurnal 4
Judul Penelitian	<i>Domestic Factor in Iranian Nuclear Agreement</i>	<i>Contentious Politics in Iran: Factions, Foreign Policy and Nuclear Deal</i>	Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Amerika Serikat mengenai Isu Nuklir pada Masa Hassan Rouhani	Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Amerika Serikat mengenai Isu Nuklir pada Masa Hassan Rouhani
Peneliti	Lauren Cardinal	Sezgin Kaya dan Zeynep Sartepe	Riezky Poetra Phenna dan Harmiyati	Amanda Rachmadianti
Fokus Penelitian	Faktor domestik Iran mempengaruhi kesepakatan JCPOA dan strategi keterlibatan Kanda	Evolusi Kebijakan dari masa revolusi Iran 1979 hingga kesepakatan JCPOA	Perubahan strategi dari konfrontatif pada masa Ahmadinejad menjadi moderat pada masa Hassan Rouhani	Keputusan Iran pada masa Hassan Rouhani menyepakati <i>Interim Agreement sebagai landasan pembentukan JCPOA</i>
Kesimpulan	Faktor lingkungan domestik dapat menjadi alat untuk memahami perilaku dan tindakan rezim	Ketegangan antara kelompok konservatif dan reformis Iran akan mempengaruhi agenda kebijakan luar negeri dari masing-masing pemimpin Iran	Perubahan sikap Iran dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani menjadi harapan baru bagi masyarakat Iran	Konsekuensi pengurangan embargo ekonomi dari negara-negara Barat terhadap Iran dan perizinan akses perdagangan internasional

Sumber: Diolah oleh penulis

2.2 Kerangka Analitis

2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu entitas dari dinamika proses politik internasional. Apabila suatu negara ingin menghadapi negara lain atau unit politik internasional maka para pembuat kebijakan harus merumuskan kebijakan luar negeri guna mencapai kepentingan nasional.¹² Konsekuensi atas keadaan komunitas internasional yang tidak pasti berdampak pada perencanaan kebijakan luar, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain motif, kepercayaan, keinginan, atau kalkulasi kapabilitas pihak lain. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan diibaratkan seperti permainan catur, terdapat gerakan dan tindakan saling berkesinambungan akibat dari aksi reaksi dari kebijakan luar negeri negara lain.¹³

Berdasarkan kondisi seperti ini suatu negara maupun pihak lain akan menganalisa pengalaman sebelumnya, kemudian akan menganalisa setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pihak lain. Sehingga negara akan mampu menghasilkan kebijakan luar negeri yang menekan pihak lain. Keberadaan dua faktor yang mendominasi dengan kemampuan mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh pemimpin negara, kelompok kepentingan, dan politik domestik merupakan hal yang berkorelasi dengan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari kondisi lingkungan internasional menjadi faktor tertentu dalam memengaruhi kebijakan agar bereaksi terhadap isu tersebut.¹⁴

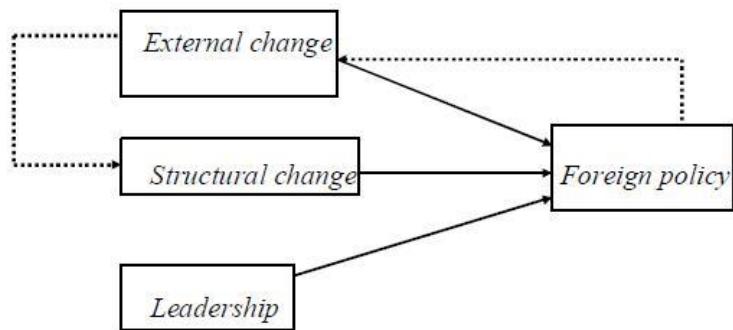
¹² Hudson, Valerie M.2008. *The History and Evolution Foreign Policy Analysis*. Dalam Foreign Policy: Theories: Actor, Case, ed. Steve Smith et.al. New York: Oxford University Press, hlm. 21

¹³ Alex Mintz, Karl DeRouen. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York Cambridge University Press. hlm.5

¹⁴ Collins, Nancy. 1995. *A Legacy of Strength and love (Interview with Clinton)*. Good Housekeeping, hlm. 113-115.

Secara umum kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu perang, perdamaian, kerjasama ekonomi. Terdapat beberapa model kebijakan luar negeri yang bisa digunakan untuk menganalisa penelitian ini. Namun dalam kali ini peneliti akan menggunakan Model Kebijakan Adaptive (*Adaptive Model*) dari Rosenau. Beberapa ahli yang meneliti mengenai politik luar negeri berfokus pada bagaimana respon dari negara-negara atas kendala-kendala dan potensi yang ada dalam lingkungannya.

Berbeda dengan para ahli sebelumnya, para ahli ini berusaha menekankan karakteristik dari lingkungan yang akan menimbulkan akibat-akibat khusus terlepas dari tindakan apapun yang diambil dan tidak memandang pilihan-pilihan politik luar negeri bagi suatu negara sebagai hal tidak terbatas. Model ini berusaha memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri berdasarkan prediksi seberapa besar kapabilitas yang dimiliki suatu negara dan letak geopolitiknya. Secara umum, politik luar negeri yang dipandang sebagai model adaptif dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Model Adaptif Politik Luar Negeri

Sumber : James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications, 1974, hal. 4

Berdasarkan model ini, politik luar negeri merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Hal ini dapat dikatakan, langkah strategis politik luar negeri suatu negara pada suatu waktu tertentu merupakan enumerasi dua variabel independen, yakni perubahan eksternal dan perubahan struktural (internal). Perspektif ini berasumsi bahwa semua negara-bangsa dapat dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Oleh karena itu analisis perspektif adaptif ini memusatkan perhatiannya pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai suatu respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya yang berubah.¹⁵ Berpijak pada penilaian dari negara tersebut akan kapabilitas yang dimilikinya, posisi geografi, dan sebagainya.¹⁶

Rosenau beranggapan bahwa politik luar negeri pada dasarnya adalah suatu langkah strategis untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap bentuk perubahan di lingkungannya. Oleh karena itu, Pemerintah dalam upayanya untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan eksternal dimana proses penyeimbangan ini mempunyai resiko dan bahkan kemungkinan disintegrasi. Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancama bagi keberadaan negara-bangsa tersebut.¹⁷ Akhirnya kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang

¹⁵ John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., hlm. 133-156.

¹⁶ Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hlm.l, Inc., Englewood Cliffs, hlm.8.

¹⁷ James N. Rosenau. 1981. *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York, Nichols Publishing, hlm. 42.

bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan disekitar mereka.¹⁸Rosenau memunculkan empat kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri dari suatu negara sebagai respon atas hambatan-hambatan dari lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi oleh para pembuat keputusan. Keempat pola adaptasi politik luar negeri tersebut, yaitu: *preservative adaptation (responsive to both external and internal demands and changes)*, *acquiescent adaptation (responsive to external demands and changes)*, *intransigent adaptation (responsive to internal demands and changes)*, *promotive adaptation (unresponsive to both external and internal demands and changes)*.

Masing-masing pola adaptasi politik luar negeri ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda bagi perubahan dan kesinambungan politik luar negeri.¹⁹ Perspektif adaptasi politik luar negeri juga mengijinkan para studiwan HI untuk melakukan studi perbandingan beberapa negara berkenaan dengan peluang dan hambatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, sehingga motvasi penelitiannya yakni mencoba untyuk memahami faktor-faktor umum, menerapkan penilaian perbandungan daripada studi kasus, mencoba merumuskan teorisasi yang menguji hipotesis, membangun prinsip-prinsip umum dari pada memberikan jawaban da jawaban segera atas persoalan penelitian. Ketika Iran melakukan pergantian pemimpin pada tahun 2013 secara garis besar arah kebijakan luar negerinya berubah. Hal ini sebabkan oleh latarbelakang pemimpin Iran kala itu yakni Hassan Rouhani lebih mengutamakan jalur diplomasi, berbeda dengan

¹⁸ Ibid., hlm.50

¹⁹ Ibid., hlm.59

pemimpin sebelumnya yang cenderung lebih menggunakan pendekatan *hard power*.

2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional

Di dalam skripsi ini peneliti akan menggunakan konsep kepentingan nasional untuk mendeskripsikan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Iran dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) tahun 2015. Dalam konteks kepentingan nasional, peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional akan berpengaruh bagi masyarakatnya. Thomas Hobbes, seorang pemikir realis, menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga karena negara merupakan suatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa adanya jaminan berbagai perangkat ataupun kondisi keamanan dalam memajukan kesejahteraan oleh negara, kehidupan masyarakat menjadi terbatas.²⁰

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, maupun sosial-budaya. Kepentingan juga didasarkan pada suatu *power* yang ingin diciptakan oleh suatu negara. *Power* tersebut akan memberikan dampak langsung bagi negara dalam perumusan kebijakan agar memperoleh pengakuan dunia. Kepentingan nasional suatu negara akan terlihat dari kebijakan luar negerinya. Pelaksanaan kepentingan nasional dapat berwujud kerjasama bilateral maupun multilateral; semua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu

²⁰ Jackson, R, Georg, Sørensen. 2014. *Introduction to International Relations: Theory and Approach, Fifth Edition*. United Kingdom. Oxford University. hlm.89

kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan kekuatan minimum yang dimiliki oleh negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Berdasarkan hal tersebut, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.²¹

Konsep kepentingan nasional, bagi Morgenthau, ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri, kemudian hal itu diputuskan oleh negara yang bersangkutan.²² Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung pada sistem pertahanan yang dimiliki, negara yang menjadi *partner* diplomatik, serta latar belakang sejarah negara tersebut. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsa yang tercipta dari karakter masyarakatnya, sehingga menghasilkan kebiasaan kebiasaan yang menjadi tolok ukur bagi suatu negara dalam menjalankan kepentingannya.

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Berdasarkan identitas yang tercipta itu dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, yang bersifat sementara ataupun yang berdimensi jangka panjang. Hal ini juga menentukan seberapa penting identitas

²¹ Theodore, A, James, H. Wolfe. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*.London. Prentice Hlm.1 International.hlm.115.

²² Hans J. Morgenthau.1949. *Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace*. New York. Alfred A Knoff, hlm. 76-105.

tersebut bagi kepentingan suatu negara. Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka memiliki kegunaan-kegunaan. James N. Rosenau menjelaskan, kegunaan tersebut yaitu: *pertama*, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi politik luar negeri. *Kedua*, sebagai alat tindakan politik, yaitu sarana guna mengecam, membenarkan, ataupun mengusulkan suatu kebijakan.²³

Menurut Donald E. Nuechterlein, kepentingan Nasional dapat didefinisikan dan dilihat dalam empat bentuk, yaitu:²⁴

- a. *Defence interests*: mencakup perlindungan negara-bangsa dan seluruh warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang berasal dari negara lain, atau bisa juga mencakup ancaman yang datang dari aktor eksternal terhadap sistem Pemerintahannya.
- b. *Economic interests*: peningkatan ekonomi negara-bangsa dalam hubungannya dengan negara lain.
- c. *World order interests*: pemeliharaan politik dan sistem ekonomi internasional, dimana negara-bangsa dapat merasa aman, sehingga perdagangan dapat beroperasi dengan damai di luar batas-batas negara.
- d. *Ideological interests*: perlindungan dan kelanjutan dari serangkaian nilai yang dimiliki dan dipercaya oleh orang-orang dari negara-

²³ *Ibid.*

²⁴ Donald E. Nuechterlein. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. British Journal of International Studies, Vol. 2, No. 3 (Oct. 1976). Cambridge University Press. Hlm..241.

bangsa. Dari keempat hal tersebut di atas, jelas bahwa kebutuhan dan keinginan suatu negara tidak saling eksklusif dan harus ada kompromi serta pengorbanan diantara mereka. Kita harus memahami bahwa kepentingan nasional sebuah negara beragam dan bersaing untuk mendapat perhatian dan sumber daya. Keadaan tersebut dapat dijadikan acuan ketika melihat alasan proses pengambilan keputusan negara-negara.

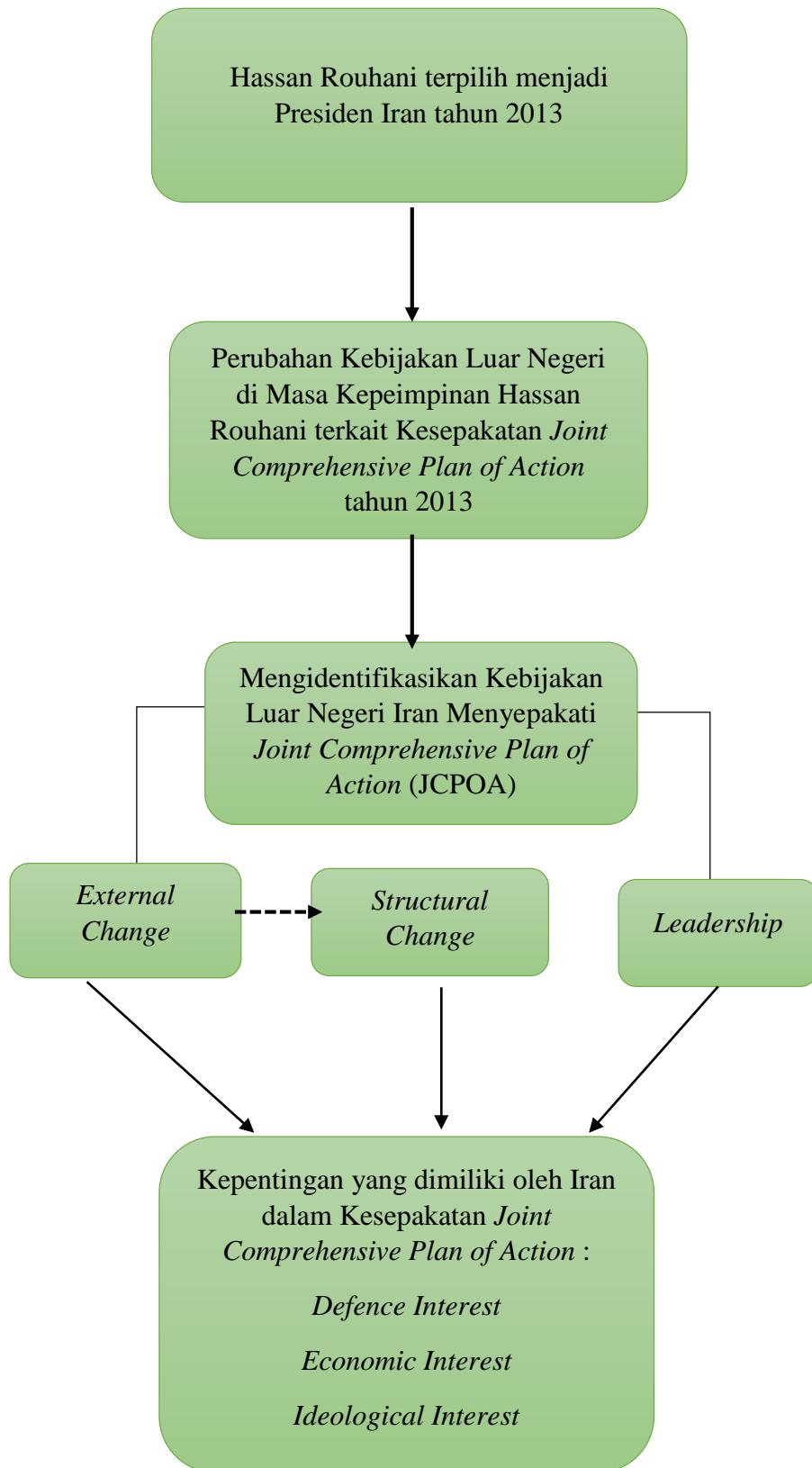
Selanjutnya peneliti akan menggunakan konsep ini sebagai alat untuk memberikan gambaran bentuk kepentingan nasional yang dimiliki oleh Iran dengan menggunakan variabel bentuk dari penjelasan di atas seperti *defense interest*, *economic interest*, *world order interest*, *ideological interest*. Mengingat Iran merupakan negara dengan pengaruh ideologi islam yang cukup kuat, doktrin militer yang memiliki tujuan pengembangan nuklir, dan menjadi negara yang cukup mengganggu Israel, dan potensi petrokimia serta petroleum cukup besar.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti mencoba menjelaskan permasalahan utama dalam kerangka berpikir yakni menganalisis kepentingan apa yang dimiliki oleh Iran dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani sehingga menyepakati *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada tahun 2015. Hal ini bertentangan dengan sikap Presiden sebelum Hassan Rouhani yaitu Mahmoud Ahmadinejad, cenderung bersikap agresif dan melawan sanksi ekonomi negara negara Barat. Sedangkan pada masa Rouhani mengutamakan negosiasi dan perundingan, sehingga menghasilkan kesepakatan JCPOA. Perubahan sikap kebijakan luar negeri terjadi pada pihak

eksternal yakni Amerika Serikat dibawah Pemerintahan Barack Obama cenderung menggunakan diplomasi dan negosiasi.

Jika dilihat embargo ekonomi negara negara Barat terhadap Iran cukup mengganggu stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, Hassan Rouhani memandang bahwa memperbaiki hubungan dengan negara negara Barat merupakan salah satu alternatif solusi. Ketika stabilitas perekonomian terganggu maka cukup sulit untuk mengembangkan sektor lainnya termasuk pengembangan nuklir. Dengan begitu, setelah mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Iran dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani akan mengetahui bentuk kepentingan yang dimiliki Iran dalam kesepakatan tersebut.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada isu atau studi kasus yang menggunakan tipe penelitian kualitatif. Alan Bryman menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan penekanan terhadap kata dibandingkan kuantitas dalam proses pengumpulan dan analisis data.²⁵ Selain itu memberikan penekanan terhadap dimensi pencarian makna dibalik fakta sosial yang ada sehingga realitas sosial tercapai dengan mendalam. Hasil akhir dari penelitian kualitatif sejatinya memudahkan peneliti yang menggunakan metode ini karena datanya berupa pernyataan-pernyataan dan output data berupa data deskriptif perihal subjek yang diteliti baik tertulis maupun lisan²⁶

Kelebihan dari metode kualitatif berupa kemampuan mendeskripsikan apa saja yang sedang diimplementasikan saat ini, dan juga ada upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi saat ini menjadikan alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Charmanz menyatakan penelitian kualitatif tidak hanya sekedar membangun teori

²⁵ Alan,Bryman.2012. *Social Research Methods*, 4th Edition. New York. Oxford University Press. hlm. 380

²⁶ Miles, B Matthew, Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.Jakarta. Universitas Indonesia Press. hlm. 15

atau melakukan generalisasi teori, melainkan teori dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan penyelidikan lebih dalam guna mendapatkan jawaban.²⁷

Karakteristik dari metode kualitatif antara lain: 1. Mempunyai alur berfikir induktif dan mengupayakan regenerasi teori yang sudah ada; 2. Berfokus pada metode individu menginterpretasikan dunia sosialnya; 3. Mempertimbangkan keadilan sosial manusia sebagai makhluk yang diciptakan.²⁸ Kemudian Liz Spenser, berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan agar memberikan pemahaman mendalam mengenai perseptif dan sejarah individu serta ditandai oleh fokus untuk menemukan perspektif aktor, metode konteks-sensitif, dan semi-terstruktur, kaya dengan data, deskripsi pada strata makna dan bagaimana pertanyaan dimunculkan.²⁹

Apabila kita lihat dari beberapa penjelasan maka, penelitian ini mengeksplorasi bukti baik numerik maupun bukti dokumen perjanjian serta percakapan sebagai data yang dapat dianalisis. Kemudian menggunakan landasan konseptual atau teori yang telah ditentukan, yang berfungsi sebagai cara menginterpretasikan hasil data yang telah ditemukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepentingan nasional yang dimiliki oleh Iran dalam JCPOA.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki makna sentralisasi fokus terhadap intisari penelitian yang akan dilakukan. Langkah ini harus dilakukan karena secara eksplisit memudahkan peneliti sebelum menganalisa lebih jauh peneltiannya. Fokus dari

²⁷ Alan Bryman, Op.cit.,hlm. 27

²⁸ Alan Bryman, Op.cit.,hlm. 381

²⁹ Liz Spencer, et.al. 2003. *Quality in Qualitative Evaluation : A Framework For Assessing Research Evidence*.London. The Cabinet Office. Hlm. 3

penelitian ini adalah kepentingan yang dimiliki oleh Iran sehingga menyepakati *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* tahun 2015-2017.

Untuk mencari kepentingan suatu negara tentu diperlukan hal-hal mendasar yang menjadi pendorong dari pembuat kebijakan mengeluarkan kebijakan bagi negaranya terhadap suatu isu. Oleh karena itu dalam membantu mengeksplorasi hal tersebut peneliti menggunakan indikator teori kebijakan luar negeri Rosenau yakni *external change, structural change, leadership*. Kemudian untuk mencari kepentingan nasional Iran dalam JCPOA, fokus yang ditekankan oleh peneliti pada tiga indikator kepentingan Donald E. Nuechterlein, yaitu : kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, kepentingan ideologi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang telah didapatkan berbentuk tulisan maupun tidak tertulis. Adapun data yang dihimpun oleh peneliti merupakan data dari tahun 2015-2017 mengenai kondisi perekonomian, perkembangan militer, sikap politik luar negeri Iran, kerjasama bilateral maupun multilateral Iran pasca penandatanganan JCPOA. Data tersebut akan didapatkan dari berbagai sumber jurnal, buku, *digital newspaper* seperti *Ministry of Foreign Affairs* (mfa.ir), *Ministry of Industry, Mine and Trade* (mimit.gov.ir), SIPRI (*the Stockholm International Peace Research Institute*), Al-Jazeera, Reuters.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan memiliki beberapa karakteristik dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data berupa bentuk dokumen yang dapat dibaca sebelumnya tidak pernah diproduksi secara spesial dengan tujuan penelitian sosial,

tersedia dan dapat dianalisis, serta memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian sosial.

Sumber didapatkan melalui media massa antara lain koran, majalah, program tv, film, internet. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini Buku putih pertahanan Iran, Doktrin Militer Iran, situs resmi Pemerintahan Iran, situs resmi IAEA, laman berita internasional yang kredibel: al-jazeera, bbc, theeconomist, reuter.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *secondary analysis*. Analisis data sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi Pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun meneliti pertanyaan penelitian utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian.³⁰ Menurut Vogel Hinds, tujuan analisis data sekunder adalah untuk menerapkan titik ulasan alternatif (*alternative point of review*) atau perspektif baru atas data yang telah terkumpul.³¹ Selain itu, teknik analisis data ini juga baik digunakan oleh peneliti untuk menggunakan ulang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Analisis sekunder melibatkan lebih dari sekedar kegiatan mengutip penelitian yang sudah ada, tetapi juga menyiratkan analisis ulang terhadap data tersebut.

³⁰ Janet Heaton. 2004. *Reworking Qualitative Data*. London. SAGE Publications Ltd.hlm.1

³¹ Vogel Hinds (Et L).1997. *The Possibilities And Pitfalls of Doing Secondary Analysis of Qualitative Dataset*, dalam *Qualitative Health Research*, Vo. 7 No.3 , hlm.408-424.

dalam menganalisis ulang data yang sudah ada, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan.³² *Pertama*, tidak memiliki tingkat pengendalian yang sama atas data yang ada, berbeda dengan saat menghasilkan data kita sendiri. Sebab itu, sangat penting untuk benar-benar mengetahui dengan jelas tentang lingkungan di mana data dihasilkan dan sejauh mana relevansinya dengan pertanyaan penelitian peneliti. *Kedua*, dapat mengajukan pertanyaan yang berbeda tergantung pada apakah data dalam format mentah atau agregat.

Proses analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1994), ada tiga tahap dalam menganalisis data yaitu:³³

1. Reduksi data Proses reduksi data merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mengkategorikan, serta membuang data yang tidak perlu.
2. Penyajian data (*display*) Setelah melakukan proses reduksi, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam tahap ini data ditampilkan dalam bentuk catatan lapangan, matriks, tabel, grafik, jaringan, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi Dalam tahap terakhir ini peneliti memaparkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, serta deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih bias.

³² Lisa Harrison Dan Theresa Callan. 2013. *Key Research Concept In Politics and International Relations*. London. SAGE Publications Ltd.hlm. 141.

³³ Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California. Sage Publication. hlm. 10-12

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi-kondisi umum dari negara yang akan diteliti yaitu Iran. Penjelasan tersebut akan dibagi kedalam beberapa bagian. Hal mendasar yang akan dijelaskan pada bagian utama adalah sejarah terbentuknya negara Iran, kemudian pada bagian kedua perkembangan kepemilikan nuklir dari awal hingga saat ini, dan bagian terakhir akan dijelaskan mengenai kesepakatan JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*).

4.1 Gambaran Umum Iran

4.1.1 Sejarah Peradaban Iran

Iran merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Sejak awal peradabannya negara ini lebih dikenal dengan sebutan Persia hingga 1935. Nama Iran sudah digunakan sejak era Dinasti Sasania yang diambil dari bahasa Persia kuno yang berarti, “negara bangsa Arya”. Iran merupakan salah satu negara dengan topografi gunung-gunung yang cukup banyak didunia. Topografi tersebut membantu Iran dalam pembentukan sejarah politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut. Iran memiliki posisi penting dalam keamanan energi internasional dan perekonomian dunia karena memiliki cadangan minyak gas dan gas alam yang

melimpah.³⁴ Pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan hingga abad ke 20 sehingga antara pegunungan satu dengan pegunungan lainnya saling terhubung.

Secara geografis Iran terletak di Asia Barat Daya antara Laut Kaspia dan Teluk Persia dengan luas 1.648.000 km², berbatasan darat dengan tujuh negara serta berbatasan laut dengan sembilan negara. Disebelah Utara adalah Armenia, Republik Azerbaijan, dan Turkmenistan; disebelah Barat yakni Turki dan Irak; disebelah timur yakni Afganistan dan Pakistan. Pada bagian Selatan berbatasan dengan garis pantai utara Teluk Persia dan Teluk Oman sepanjang 1.700 km. Tidak hanya Teluk Persia saja, Iran memiliki pantai sepanjang 740 km disepanjang Laut Kaspia yang perairannya berbagi dengan Azerbaijan, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan. Jumlah populasi Iran pada tahun 2018 yaitu 83.024.745, menempati posisi 17 populasi terbanyak didunia.³⁵ Berikut adalah letak lokasi Iran dan negara tetangga sekitarnya.



Gambar 4.1 Peta Lokasi Iran

Sumber : International Crisis Group

³⁴ General View About Iran. Ministry of Foreign Affairs. Diakses melalui <http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=2140> pada 16 Juni 2019

³⁵ The World Factbook. Middle East: Iran. Central Intelligence Agency. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html> pada 16 Juni 2019.

Iran memiliki populasi heterogen dengan bahasa masing-masing seperti Indo-Iranian, *Semithic*, Turki. Untuk kelompok populasi Indo-Iran memakai bahasa resmi yaitu bahasa Persia, kurang lebih 20 persen dari total populasi berbicara menggunakan bahasa Turki. Sejak dulu masyarakat Iran terbagi dalam ketiga tingkat atau *tabagheh*; kelas pertama atau kelas atas; kelas menengah; kelas bawah. Revolusi Iran 1979 telah mengakhiri pola Pemerintahan monarki yang telah berlangsung kurang lebih 500 tahun. Tradisi monarki tersebut bahkan lebih tua. Kekaisaran pertama Iran yakni Kekaisaran Achaemenid pada abad keenam SM, memiliki sistem Pemerintahan monarki absolut, Pemerintah terpusat, sistem administrasi yang sangat berkembang, dan budaya yang unik serta menjadi peradaban budaya dunia. Kekaisaran Achemeonian berakhir pada tahun 330 SM kemudian digantikan oleh Alexander Agung. Dibawah dinasti Sassania (224-642 Masehi) menjadi pusat kerajaan dan peradaban besar.

Saat Islam menaklukkan Iran abad ketujuh berdampak pada perubahan yang sangat besar antara lain agama baru, sistem sosial baru, dan hukum baru. Iran bukan lagi menjadi pusat kekaisaran dunia lagi akibat dari peristiwa tersebut.³⁶ Meskipun begitu sejarahwan menemukan keselarasan signifikan antara Islam dan struktur sosial, adminisitrasi, dan budaya Iran. Kontribusi nyata yang diberikan oleh masyarakat Iran terhadap semua aspek peradaban islam mampu membentuk babak baru dalam tatanan negara Iran. Pada abad kesembilan, terjadi kebangkitan bahasa Persia dan didukung pengaruh Arab dan Islam. Mayoritas masyarakat Iran saat itu menganut agama islam syiah sebanyak 90 persen dan Islam Sunni hanya 8 persen.³⁷

³⁶ Helen C.M. 2008. *Iran a Country Study History of Iran*. Handbook Series, Fifth Edition, First Printing. Federal Research Divison Library of Congress. Hlm. 3-4

³⁷ Ibid., hlm. 5

Dinasti Safavi memulai kekuasaannya di Iran tahun 1501-1722 dengan sistem Pemerintahan berdasarkan Islam Syiah dan bahasa Persia dijadikan bahasa administrasi Pemerintahannya

Kekuasaan Dinasti Safavid berakhir pada tahun 1722 saat tentara Afganistan menginvasi dan menguasai Isfahan. Kemudian setelah runtuhan Dinasti Safavid, pada tahun 1750 Agha Mohammad Khan mendirikan Dinasti yang bernama Qajar. Harapan dari keberadaan dinasti tersebut ialah untuk memperbaiki kondisi Iran yang tidak stabil. Iran dianggap sebagai kekuatan besar non-Eropa dikawasan Timur Tengah, saat masa Dinasti Qajar juga secara masif melakukan ekspansi wilayah, menyerang, bahkan menaklukkan daerah sekitarnya.³⁸ Dinasti Qajar telah berkuasa di beberapa wilayah bagian seperti Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afganistan, Bahrain, dan Pakistan. Pimpinan tertinggi Dinasti Qajar kemudian digantikan oleh Ali Shah. Pergantian pimpinan tertinggi dinasti ini menyebabkan perubahan kekuatan dan kedaulatan.

Peristiwa Perang Dunia I, Iran dibawah kekuatan Dinasti Qajar yang dipimpin oleh Ali Shah mendapatkan banyak intervensi dari beberapa negara seperti Rusia, Inggris, dan Turki. Intervensi asing tersebut mengganggu stabilitas Pemerintahan. Iran sehingga menyebabkan Dinasti Qajar dibawah kepemimpinan Ali Shah Khan bergejolak. Tidak hanya intervensi saja, baik Turki, Inggris, Rusia menuntut hak istimewa kepada Iran yang diwujudkan dalam perjanjian Turkmenistan. Situasi ini semakin genting saat terjadi pemberontakan di beberapa wilayah di Iran dan menguatnya pengaruh Inggris setelah Perang Dunia I. Dampak dari hal tersebut

³⁸ Joseph.J.S, Naghshpour.S. 2011. *Revolutionary Iran and the United States Low Intensity Conflict in the Persian Gulf*.England.Ashgate Publishing Limited. Hlm.59

memunculkan Gerakan Konstitusi Iran, yaitu gerakan yang menginginkan reformasi rezim Qajar dan kebebasan dari kolonial Inggris dan Rusia. Reza Khan merupakan prajurit militer yang melakukan kudeta untuk mengganti Ahmad Shah dengan bantuan Inggris pada tahun 1921, dan menjadi awal kemunculan Dinasti Pahlevi.³⁹

Keberhasilan kudeta Reza Khan yang dibantu oleh Inggris mengantarkannya kepada pemimpin tertinggi Iran selanjutnya. Walaupun Inggris merupakan negara pertama yang mengakui Reza Khan sebagai kepala negara baru justru dimasa kepemimpinannya Iran bertekad mengurangi campur tangan asing di berbagai sektor. Pada awal kepemimpinannya, Reza Khan mendeklarasikan beberapa hal antara lain darurat militer, pelarangan pertemuan dan publikasi pers, bertindak tegas dan otoriter terhadap oposisi dan kudeta.⁴⁰ Rezim ini membangun kekuatan militer yang didasarkan pada ketersediaan kuantitas tentara. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan Pemerintah dan perdana menteri sebelumnya untuk mempertahankan *power* Iran. Langkah yang diambil oleh Khan berupa konsolidasi berbagai kelompok militer menjadi satu kekuatan terpadu, setelah itu menghancurkan kekuatan suku kecil diseluruh negeri sehingga tercipta persatuan.

Kediktatoran dan sikap otoriter yang dilakukan oleh Reza Khan membuat rakyat Iran menderita. Meskipun pertumbuhan ekonomi selama periode ini meningkat tetap saja tidak merubah perekonomian masyarakat Iran secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan segala sesuatu kebijakan ekonomi hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadinya. Pengaruh komunis di Iran

³⁹Taleghani.I.2017. *Reza Shah's Role in the Collapse of Iran's Constitutional Movement* . International Journal of Scientific Study Vol.4 Issue 4. Hlm.318

⁴⁰ Ibid., hlm.321

menimbulkan kekhawatiran bagi Inggris. Oleh karena itu Inggris mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan presensinya di Iran. Pengaruh Komunis di Iran semakin kuat, tentu hal tersebut membuat Inggris semakin khawatir. Negosiasi politik yang dilakukan antara Inggris dan Pemerintah Iran untuk mengkampanyekan anti-komunis dikalangan masyarakat Iran sangat panjang bahkan menimbulkan kontroversi, karena Shah Reza membatalkan konsesi D'Archy yang telah disepakati sejak tahun 1901. Proses negosiasi itu akhirnya mencapai titik terang saat Inggris menyepakati perjanjian minyak dengan Pemerintah Iran pada tahun 1933, perjanjian itu apabila dilihat dari sisi ekonomi lebih menguntungkan Iran.⁴¹ Keruntuhan dari Reza Khan terjadi saat terjadinya Perang Dunia II, ketika itu Inggris-Rusia melakukan invansi ke Iran pada tahun 1941.

Kehadiran Dinasti Pahlevi untuk menggantikan dinasti sebelumnya menandai awal sejarah hubungan Amerika Serikat-Iran yang sangat erat hingga keruntuhannya.⁴² Gagasan untuk membentuk tatanan Pemerintahan Iran yang lebih stabil memberikan manfaat berupa kontrol lebih besar akan wilayahnya, dengan begitu maka negara-negara besar akan menarik diri dari wilayah ini. Implementasi atas gagasan tersebut yakni hadirnya tatanan politik baru berupa sistem monarki absolut dimana Pemerintah pusat bertindak lebih sewenang-wenang untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun dengan kata lain sistem ini menyebabkan sentralisasi kekuasaan pada Pemerintah pusat.⁴³ Awal kehadiran

⁴¹ Behraves,M.2010. *Iran and Britain: The Politics of Oil and Coup D'état before the Fall of Reza Shah*. Hlm.2

⁴² Joseph.J.S, Naghshpour.S, hlm. 90

⁴³ Talinn,G.2016. *Political Landscapes of Capital Cities: Tehran A Revolution Making*. University Press of Colorado. Hlm.360

sistem ini sangat asing bagi masyarakat Iran karena sistem insitusi sebelumnya adalah tradisional lokal dan regional. Kepentingan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan Iran didasarkan pada aspek politik, ekonomi, keamanan. Pihak Amerika Serikat menginginkan aliansi di wilayah Timur Tengah, Iran pada masa kepemimpinan Shah Reza Pahlevi dianggap sebagai aktor penting membantu Amerika Serikat memberikan pengaruhnya di Timur Tengah.

Kepemilikan Iran akan sumber daya minyak menjadikan salah satu kekuatan Amerika Serikat mengurangi dominasi hegemoni Inggris dipasar minyak internasional dan mencegah munculnya kekuatan perusahaan minyak non-Amerika. Ketika Perang Dunia II berakhir para produsen minyak Amerika berharap bahwa ladang-ladang minyak akan menjadi partner kedua setelah Arab Saudi. Kepentingan lain yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah kebijakan militer “*Twin Pillars*” yang berupaya melindungi Teluk Persia dengan meminta bantuan Iran dan Arab Saudi.⁴⁴ Pendekatan Iran terhadap Teluk Persia lebih krusial dan fundamental dibandingkan dengan Arab Saudi, karena terdapat kedekatan sejarah dan sifat budaya.

Saat Perang Dunia II berakhir hubungan diplomatik Iran dengan Amerika Serikat semakin erat, dengan begitu pengaruh Amerika Serikat kepada Iran sangat besar. Peristiwa perang dunia II menjadikan Amerika Serikat sebagai negara Adikuasa dan mengubah hubungan internasional sejak itu. Pasca Perang Dunia II hingga pertengahan 1960-an merupakan momentum negara-negara bekas jajahan

⁴⁴ Behestani, B and Shahidan, M.H. 2015. *Twin Pillars Policy : Engangement of US-Iran Foreign Affairs during the Last Two Decades of Pahlavi Dynasty*. Asian Social Sciense; Vol.11, No.2. hlm.29

merdeka dan penghapusan kekuasaan kolonial. Ketika perang dingin berlangsung antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menciptakan dilema bagi Iran karena berada diantara dua kekuatan besar. Keinginan Iran untuk menyeimbangkan dukungan dihadapkan oleh realitas bahwa negara ini memiliki posisi penting dikawasan Timur Tengah. Intervensi yang dilakukan oleh Rusia mengakibatkan Iran memiliki kecenderungan mendukung Amerika Serikat. Shah Reza Pahlevi yakin bahwa Amerika Serikat menjadi kekuatan kolonial baru walaupun dalam era perang dingin Iran memberikan bantuan-bantuan kepada Amerika Serikat.

Iran maupun sebagian negara menganggap bahwa Amerika Serikat sebagai penyelamat kondisi negara. Saat permasalahan Azerbaijan dan Kurdistan telah usai maka diadakan pertemuan Majles ke-15. Pertemuan tersebut menghasilkan kebijakan penetapan supremasi atas seluruh negara dan berkat bantuan militer berhasil merubah hasil pemilihan partai nasionalis tidak dapat menempatkan satupun anggota di Majles. Segala jenis bentuk kecurangan dalam pemilihan yang dilakukan oleh Shah Reza Pahlevi pada masa yang akan mendatang akan didukung oleh Amerika Serikat jika itu meminimalisir pengaruh komunis atau oposisi pengaruh Barat diluar Pemerintah.⁴⁵

Pada tahun 1979, Iran sebagai sekutu besar AS di Timur Tengah menyatakan kemerdekaannya setelah kurang lebih 185 tahun dibawah dominasi Barat melalui gerakan Revolusi Islam Iran. Gerakan Revolusi tersebut dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khoemeni. Sejak berdirinya Republik Islam pada tahun 1979, Ayatollah Khomeini memiliki visi revolusioner bahwa semangat keadilan, islam dapat

⁴⁵ Joseph.J.S, Naghshpour.S, hlm. 82

menyebar ke seluruh dunia Arab dan Islam.⁴⁶ Peristiwa Revolusi Iran menyebabkan konflik AS-Iran mulai muncul setelah kurang lebih 30 tahun menjalin hubungan diplomatik yang erat. Dampak lain akibat hal tersebut adalah para penguasa yang selama ini mempertahankan Shah Reza Pahlevi sebagai Presiden Iran merasa terancam karena digantikan oleh kelompok oposisi yang ingin merubah seluruh aspek.. Konsekuensi atas revolusi tersebut tentu tidak memiliki aliansi erat dengan negara lain.⁴⁷

Keberhasilan revolusi tersebut berdampak pada perubahan keseluruhan sistem dan bentuk negara. Iran mendeklarasikan diri sebagai Republik Islam Iran setelah gerakan revolusi 1979. Perubahan juga terjadi pada sistem politik berupa *wilayat al-faqih* sebagai tafsiran dari Syiah Dua Belas Imam yang menjadi ideologi negara, individu yang menempati posisi tertinggi dalam sistem kenegaraan disebut *Rahbar*.⁴⁸ Kewenangan dari *Rahbar* untuk mengeluarkan sebuah fatwa yang legitimasinya setara dengan Undang-Undang negara tersebut. Awal pelaksanaan sistem politik *wilayat al-faqih* Iran hanya berfokus pada konsep-konsep keagamaan, kemudian seiring perjalanan waktu mulai mengenal konsep sosial dan politik. Dalam sistem tersebut, tidak ada pemisahan antara agama dan politik, karena Ayatollah Khoemeni menganggap pemisahan aspek politik dan agama merupakan propaganda imperialisme.⁴⁹

⁴⁶ Sadjadpour,K. 2009. *Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader*. New York.Carnegie Endowment For International Peace. Hlm.21

⁴⁷ Joseph.J.S, Naghshpour.S hlm.143

⁴⁸ Vaezi.A.2004. *Shia Political Thought*. Islamic Centre of England. Hlm..53

⁴⁹ Imam.Khomeini. *Governance of The Jurist (Velayat-e Faqeeh): Islamic Government*. Tehran. The Institute fot Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Division). Hlm.15

Bukan perkara mudah hal yang dihadapi oleh Iran setelah revolusi 1979, terdapat tugas utama merencanakan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang dasar 1906. Proses perencanaan konstitusi baru tersebut mengalami kendala yaitu terdapat dua kelompok kepentingan. Khomeini dengan pengikutnya bertekad untuk menjadikan konsep *velayat-e faqeh* sebagai dasar negara dan Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri resmi yang menginginkan Republik Islam bersifat demokratis. Perang Iran-Iraq selama delapan tahun yang dimulai pada tahun 1983 diprakarsai oleh Saddam Hussein memaksa Iran untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik maupun militer untuk melawan Iraq.⁵⁰ Tujuan dari Saddam Hussein mendeklarasikan perang ini adalah menguasai kembali jalur air Shatt Al-Arab. Pemerintah Iran kala itu melakukan mobilisasi milisi menjadi kekuatan militer formal yang bernama *Sepah-e Pasdaran-e Engelabi* (Pasukan Pengawal Revolusi) dan *Basej-e Mostazafen* (Pasukan Kaum Tertindas). Selain keamanan Pemerintah Iran pada masa perang mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berupa menasionalisasi perusahaan nasional, membatasi impor, kontrol harga, penyediaan bahan makanan bagi masyarakat kurang mampu. Kebebasan pers kala itu sangat dibatasi oleh rezim Khomeini, menghilangkan buku-buku tentang kesuksesan sistem monarki dan sekuler.

Setelah Khomeini wafat pada tahun 1989, masyarakat Iran melakukan pemilihan pemimpin tertingginya dan Ali Akbar Hashemi Rafsanjani terpilih untuk menggantikan Khomeini. Rafsanjani menegaskan bahwa akan memberikan prioritas pada masalah-masalah politik dunia dibandingkan permasalahan

⁵⁰ Abrahamian.E.2008.*A History Modern Iran*. New York. Cambridge University Press.
hlm.185

keagamaan, disebut juga sebagai proses rasionalisasi dari rezim ini.⁵¹ Upaya pertama yang dilakukan oleh pemimpin baru Iran adalah meliberalisasi ekonomi, walaupun begitu Pemerintah tidak ingin menyebutnya dengan liberal karena hal itu dikecam oleh Khomeini. Kebijakan yang paling terlihat yaitu upaya menekan jumlah populasi melalui program KB.

Pada masa kepemimpinan Rafsanjani, Iran mengalami sedikit perubahan arah kebijakan terutama aspek ekonomi. Beberapa rencana telah dirancang seperti, mulai menarik investor asing ke Iran salah satunya rencana menyepakati kontrak investasi senilai \$1 miliar dengan *American Conoco*, menyusun UU Investasi baru, dan UU Ketenagakerjaan. Tentu kondisi ini memunculkan respon keras dari loyalis Khomeini, Oposisi, Dewan Wali, dan Anggota Majles. Keinginan rezim ini membawa perubahan ekonomi Iran yang signifikan justru mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengharuskan pemimpin Iran tertinggi kala itu Rafsanjani mengakhiri masa jabatannya.

Konsekuensi atas kondisi krisis tersebut Rafsanjani digantikan kandidat berasal dari golongan reformis yang merupakan mantan menteri kebudayaan Iran bernama Hujjatul Islam wal Muslimeen Sayyed Mohammad Khatami untuk masa jabatan 1997 hingga 2001. Sejak tahun 1978 Partai Konservatif sangat menonjol dalam politik nasional dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, militer, dan pejabat politik. Oleh karena itu dengan terpilihnya Khatami sebagai pimpinan tertinggi Iran yang berasal dari golongan reformis adalah sejarah baru bagi dunia politik Iran. Bagi masyarakat Iran Khatami merupakan individu yang

⁵¹ Naghme, S. 2009. *The Curious Case of Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani*. Massachusetts. Crown Center for Middle East Studies. Hlm.4

memiliki pemikiran liberal.⁵² Program-program yang dikampanyekan olehnya apabila terpilih menjadi Presiden Iran antara lain; masyarakat sipil, memulihkan perekonomian, benturan peradaban dan dialog peradaban.

Pemilihan presiden pada tahun 1999 memenangkan Khatami dengan jumlah suara tertinggi mencapai 75 persen. Kemenangan Khatami ini dimanfaatkan untuk membuka hubungan diplomatik dan memperbaiki politik internal, kebijakan untuk mengurangi dominasi negara atas kontrol ekonomi. Tak hanya itu pada masa Pemerintahannya dukungan terhadap wanita sangat tinggi, beberapa kebijakan yang dikeluarkan seperti pemberian izin bagi wanita mendapatkan pendidikan tinggi diluar negeri, keringanan untuk memakai jilbab. Pemikiran liberalis yang dimiliki oleh Khatami berdampak pada terjadinya kesetaraan gender di Iran dan meratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kebebasan pers sangat didukung oleh rezim ini, hal itu dinuktikan dengan alokasi anggaran dan penyaluran dana negara kepada organisasi non-Pemerintahan seperti teater, pusat budaya, dan media cetak.

Kemajuan dan perubahan Iran kearah yang lebih baik dibawah kepemimpinan Khatami memunculkan reaksi dari golongan konservatif karena dianggap melanggar syariah dan konstitusi.⁵³ Peradilan menutup beberapa surat kabar dan lebih dari 60 jurnal publikasi. Tekanan yang dialami oleh rezim dan golongan reformis tidak hanya berasal dari internal saja melainkan dari eksternal, pada tahun 2002 Presiden Bush dalam pidato menyatakan bahwa Iran merupakan ancaman utama perdamaian dunia dan melakukan propaganda Iran membangun

⁵² Takeyh.R.2004. *From Reform to Revolution ?*. Journal vol.46, no.1, Spring. The International Institute for Strategic Studies. hlm.132-133

⁵³ Abrahamian.Op.cit, hlm. 191

persenjataan nuklir serta membiayai terorisme internasional. Tekanan demi tekanan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, kemunduran prospek reformasi yang dikampanyekan oleh Khatamin tidak menurunkan semangat reformasi dari Khatami untuk memperbaiki situasi internal negara yang tidak kondusif. Meskipun begitu langkah yang dilakukan Khatami tidak merubah situasi stabilitas politik Iran.

Momentum tersebut berdampak positif bagi golongan konservatif karena memenangkan beberapa pemilihan, dewan kota pada tahun 2003, pemilihan Majles 2004, dan pemilihan presiden tahun 2005. Mahmoud Ahmadinejad merupakan kandidat terpilih pada tahun 2005 untuk menggantikan Khatami. Selama masa kepemimpinannya dua periode, Ahmadinejad berupaya mengimplementasikan semangat maupun nilai-nilai revolusi yang telah diterapkan oleh Ayatollah Khomeini pada saat Revolusi Iran 1979.⁵⁴ Ahmadinejad menjadi pemimpin Iran selama dua periode yakni 2005-2008 dan 2008-2013.

Mayoritas pemimpinan-pemimpin Iran sebelumnya berasal dari kalangan Mullah, namun Ahmadinejad merupakan seorang dosen. Pada tahun 2006, Pusat Penelitian Ilmiah dan Studi Strategis Timur Tengah mengadakan pertemuan di Teheran mengenai kebijakan luar negeri Pemerintahan Ahmadinejad. Menteri luar negeri Iran yakni Manouchehr Motakki mengidentifikasi perubahan arah kebijakan luar negeri Iran dibawah rezim baru disebabkan respon terhadap dua perkembangan; *Pertama*, kegagalan rezim sebelumnya atas dialog konstruktif

⁵⁴ Maaike,W. 2013. *Iranian Foreign Policy During Ahmadinejad: Ideology and Actions*. United States. Palgrave Macmillan. hlm.1

dengan negara-negara Barat perihal kesetaraan power, *kedua* peningkatan unilateralisme Barat.⁵⁵

Pasca keruntuhan Uni Soviet Gerakan Non-blok kehilangan power, sementara itu Barat semakin giat mengejar dominasi global yang unilateral. Kemunculan kekuatan baru dari Tingkok, India, Rusia tidak mencegah negara-negara Barat untuk mendominasi global. Peristiwa 11 September 2001 menjadikan negara-negara Barat semakin menyusun strategi yang terstruktur untuk mendominasi global. Ketika Pemerintah Iran berupaya memulai dialog dengan negara-negara Barat namun tidak mendapatkan respon. Motakki menyatakan dibawah kepemimpinan Ahmadinejad, Iran mencoba untuk memperluas hubungan regionalnya dan meningkatkan *power* sehingga setara dengan negara-negara Arab lainnya. Selain itu mengambil peran utama anti hegemonik global diantara negara-negara berkembang. Pada dasarnya dibawah kepemimpinan Ahmadinejad kelompok islam garis keras dan golongan konservatif bersatu untuk mendukung kemajuan Iran⁵⁶.

Kebijakan luar negeri selama masa kepemimpinan Ahmadinejad merepresentasikan sentralitas kawasan dan mengidentifikasi Iran dengan beberapa negara Arab khususnya Irak, Afghanistan, Libanon, Palestina. Rezim ini melihat peran penting Iran sebagai contoh negara yang telah bangkit dari dampak kekuatan dominasi global oleh Barat dan menjadi negara yang resistan. Situasi penting ini sesuai dengan keadaan regional Timur Tengah yang kurang kondusif selama masa presiden Iran sebelum Ahmadinejad. Keruntuhan Rezim Saddam Hussein dan

⁵⁵ Ibid., hlm.2

⁵⁶ Kasra, N.2008. *The Secret History of Iran Radical Leader*.California. University of California Press. hlm.149

Rezim Taliban akibat pengaruh eksistensi Amerika Serikat di Timur Tengah telah meningkatkan perhatian Iran terhadap kedua negara tersebut. Kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah terutama di Afganistan dan Irak menyebabkan Iran mengalami *security dilemma*.⁵⁷ Peningkatan pengaruh Iran di dua negara tersebut terjadi pada masa Ahmadinejad, hal tersebut sangat jelas selain hubungan sejarah budaya terdapat faktor lainnya yakni ekonomi. Dalam wacana kebijakan luar negerinya, Ahmadinejad berpandangan selama ini negara-negara Arab (selain Irak, Lebanon, Palestina) menjadi aktor pendukung dibalik penindasan dan penyebab penderitaan rakyat Palestina. Berdasarkan pandangan tersebut, implementasi kebijakan luar negeri guna menyelesaikan persoalan tersebut ialah dengan cara meningkatkan kerja sama regional sehingga menciptakan persatuan melawan kekuatan arogan.

Implementasi kebijakan luar negeri untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Arab disekitar Iran memiliki tujuan mengubah citra bahwa Iran bukan menjadi kekuatan yang mencegah penyelesaian konflik Palestina-Israel, konflik di Lebanon, dan Irak. Pada Oktober 2005, Motakki yang merupakan Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan pertamanya ke lima negara Teluk Persia : Kuwait, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, dan Qatar dengan tujuan memperluas kerja sama dengan negara-negara ini di semua bidang dan upaya peningkatan keamanan dan stabilitas regional kawasan Timur Tengah.

Tidak hanya negara-negara Teluk Persia, Pemerintah Ahmadinejad melakukan kunjungan lainnya ke negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya

⁵⁷ Maaike,W, Op.Cit, hlm.115-116

seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Libya, serta Jordania pada tahun 2006. Ali Larijani selaku sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran melakukan kunjungan ke Oman, Qatar, Arab Saudi, Yaman, Mesir, dan Aljazair. Segala kunjungan yang dilakukan oleh rezim ini bertujuan meningkatkan kerja sama keamanan dan stabilitas regional, serta meyakinkan negara-negara Arab bahwa Iran tidak menciptakan senjata nuklir. Kekhawatiran muncul dari negara-negara Teluk Arab terhadap peningkatan kekuatan Iran di regional, Arab Saudi mengambil langkah tegas untuk mencegah Iran menghancurkan monarki Teluk.⁵⁸ Pemerintah Arab menganggap Ahmadinejad memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan dukungan dari negara-negara Arab, akan meningkatkan perpecahan antara massa Arab pro-Palestina dan Arab pro-Barat. Kekaguman Ahmadinejad terhadap Ayatollah Khomeini mengenai gagasan anti-Amerikanisme sebagai kekuatan yang menyatukan kekuatan dimasa-masa awal Republik Islam menyebabkan Ahmadinejad menjadikan gagasan tersebut sebagai basis kekuatan pemeritahannya.⁵⁹

Kecurigaan negara-negara Teluk Arab terhadap Iran semakin meningkat saat beberapa kesalahan sikap yang dilakukan oleh Iran. *Pertama*, ketika Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani mengunjungi Iran pada April 2006 dengan tujuan melakukan hubungan diplomatik yang baik dengan Iran. Hamad mengatakan tim sepakbola nasional Iran tampil dalam Piala Dunia 2006 di Jerman merupakan kebanggaan wilayah Teluk Arab, tetapi pejabat resmi Iran bersikeras bahwa Iran akan membuat bangga Teluk Persia. Penggunaan istilah Teluk Persia jika

⁵⁸ International Crisis Group. 2018. *Iran's Priorities in a Turbulent Middle East*. Belgium. Hlm.2

⁵⁹ Kasra, N.Op.Cit. Hlm.150

ditafsirkan secara politik sangat sensitif karena dianggap sebagai ekspansionisme Iran. *Kedua*, Menteri Dalam Negeri Iran Mostafa Pourmohammadi menyatakan pendapat kontroversial yakni bangsa Iran memiliki kendali atas rute energi terbesar dan paling sensitif di dunia. Negara-negara Teluk Arab menafsirkan hal tersebut sebagai ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz yang selama ini menjadi sumber perekonomian negara-negara Teluk Arab. *Ketiga*, pernyataan yang disampaikan oleh Motakki mengenai stabilitas Teluk Persia akan tercapai melalui kerja sama negara-negara kawasan bukan mengandalkan kekuatan Amerika Serikat. Pernyataannya ditafsirkan sebagai ambisi Iran untuk menggantikan kekuatan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Sikap Iran untuk menjalin hubungan erat dengan negara-negara kawasan regional Timur Tengah justru menyebabkan negara-negara Teluk Arab seperti Arab Saudi memiliki motif untuk menumbuhkan persepsi ancaman regional terhadap Iran. Dukungan Amerika Serikat kepada Arab Saudi semakin memperkuat persepsi ancaman tersebut, tujuan lainnya yaitu melegitimasi penindasan minoritas Syiah karena menganggu monarki Arab Saudi. Amerika Serikat menyatakan bahwa akan menciptakan sebuah persepsi ancaman kepada Iran sehingga memperkuat aliansi keamanan negara-negara Teluk Arab dengan Barat. Negara-negara Arab percaya tujuan dari program nuklir Iran yakni untuk memperoleh senjata nuklir dan mendominasi Teluk Persia.⁶⁰

Keadaan ini menjadi alasan Ahmadinejad meningkatkan hubungan dengan negara-negara Teluk Arab yang tidak pro-Barat seperti Bahrain, Suriah, dan Irak.

⁶⁰ Osiewicz, P. 2014. *The Iranian Foreign Policy in The Persian Gulf Region Under The Rule of President Hassan Rouhani: Continuity or Change*. Polandia. University of Poznan. Hlm. 253

Ketertarikan Iran membangun aliansi dengan partai-partai guna memperkuat pengaruh mereka, termasuk kelompok-kelompok pemberontak, kelompok politik dikawasan Timur Tengah yang dipinggirkan oleh rezim Arab pro-Barat. Kelompok-kelompok tersebut menawarkan kepada Iran strategi potensial berupa jaringan-jaringan yang dimiliki untuk melawan kekuatan dan pengaruh negara-negara Barat di kawasan Timur Tengah.⁶¹ Tidak hanya berhenti sampai situ saja, Ahmadinejad berupaya menjalin kerjasama menggalang dukungan nuklir sipil Iran untuk tujuan damai dengan negara-negara berkembangan dikawasan Amerika Latin, Afrika, negara-negara dunia ketiga di Amerika Selatan, hingga Asia.

Keinginan Ahmadinejad untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi terus berlanjut, hingga pada tahun 2007 diadakan pertemuan tentang kekerasan di Lebanon dan pertemuan dengan Palestina di Mekah untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Namun ketegangan antara Arab Saudi dan Iran terjadi kembali pada Mei 2008, Arab Saudi menuduh Iran sebagai aktor utama dibalik kudeta yang terjadi di Lebanon. Meskipun demikian Pemerintahan Ahmadinejad mengklaim hubungan Iran dengan negara-negara Arab termasuk Arab Saudi baik, intervensi AS menciptakan kesulitan kerjasama regional antar negara-negara di Timur Tengah. Pada awal 2009, pejabat Iran mengatakan Bahrain secara historis merupakan provinsi Iran. Dampak dari pernyataan tersebut adalah Moroko memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran karena dianggap melakukan ekspansionis.

⁶¹ Barfi, B. 2016. *The Real Reason Why Iran Backs Syria*. Diakses melalui <https://nationalinterest.org/feature/the-real-reason-why-iran-backs-syria-14999> pada 20 Juni 2019

Oleh karena itu dapat dipahami sampai peristiwa *Arab Springs* terjadi, sikap kebijakan luar negeri yang diambil oleh Ahmadinejad merepresentasikan keinginan peningkatan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Sementara itu pada tahun 2012 ketegangan Iran-Barat di Timur Tengah justru meningkat karena Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Ancaman tersebut akan berdampak buruk karena arus perdagangan 20-40 persen minyak dunia melalui Selat Hormuz.⁶² Sikap keras yang digunakan oleh Ahmadinejad kepada negara-negara Barat justru berdampak buruk kepada Iran. Timbal balik yang diberikan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat berupa embargo ekonomi, bagi negara-negara sekutu Amerika Serikat dilarang melakukan perdagangan internasional dengan Iran. Apabila sekutu Amerika Serikat melakukan perdagangan dengan Iran maka akan terkena embargo ekonomi juga.

Ketidakstabilan Pemerintah Iran menyebabkan Ahmadinejad pada awal 2012 dipanggil oleh Majles untuk diberikan pertanyaan formal perihal kondisi internal negara. Puncak dari ketidakstabilan tersebut terjadi perpecahan antara kaum konservatif dan reformis pada tahun 2013. Perpecahan tersebut akibat dari kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim ini terhadap para pejabat yang berasal dari kaum reformis, menempatkan para koruptor dalam tahanan rumah dan menghukum gerakan yang mengkritik hasil pemilu. Kemudian Iran melaksanakan pemilihan presiden pada tahun 2013, Ahmadinejad kembali mencalonkan diri sebagai presiden namun tidak terpilih akibat kekecewaan Majles dan masyarakat Iran atas ketidakstabilan politik, isolasi internasional, isu nuklir, dan perekonomian.

⁶² Meredith, S. 2019. *Could Iran Close The Strait of Hormuz ? Energy Analysts Skeptical of Tehran's Latest Threat*. Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2019/04/23/iran-oil-sanctions-strait-of-hormuz-in-focus-as-oil-prices-rise.html> , pada 22 Juni 2019

Kemenangan Hassan Rouhani mengejutkan banyak pihak, Ayatollah Ali Khamenei memastikan bahwa kandidat konservatif yang kuat akan menang. Jika dibandingkan dengan kandidat calon presiden lainnya, Hassan Rouhani merupakan kandidat paling konservatif.⁶³ Hassan Rouhani menjadi Presiden Iran disaat kondisi stabilitas politik sedang tidak kondusif. Baik secara regional maupun internasional citra Iran dibawah kepemimpinan Ahmadinejad dianggap terlalu revolusioner. Masyarakat Iran memuji Rouhani sebagai seorang pemimpin yang mampu meningkatkan posisi Iran di dunia Internasional, sebagai mantan kepala negosiator nuklir Iran memberikan jaringan luas untuk membangun citra yang baik bagi Iran.⁶⁴

Untuk melakukan reformasi kebijakan luar negeri rezim ini memiliki tiga pokok subjek antara lain melakukan reformasi membangun kembali ekonomi, menyelesaikan permasalahan nuklir, dan menghentikan isolasi internasional. Prioritas utama bagi Rouhani ialah membangun kembali perekonomian Iran, rencana ini akan mencakup negosiasi sanksi berupa embargo ekonomi dan merubah citra Iran yang dianggap sebagai negara yang membebani dunia internasional.⁶⁵ Rencana Iran untuk melakukan rehabilitasi ekonomi menuai hasil, IMF memperkirakan ekonomi Iran akan meningkat 2,2 persen pada tahun 2015. Kredibilitas internasional dan kemauannya untuk berkompromi pada isu nuklir menyebabkan dunia internasional terkhusus negara-negara Barat memberikan keringanan sanksi ekonomi. Perkiraan yang disampaikan oleh IMF didorong oleh industri otomotif Iran; produksi mobil meningkat 53 persen antara tahun 2013-

⁶³ Clifton, W.S. 2014. *Why Hassan Rouhani Won Iran's 2013 Presidential Election*. Middle East Policy, Vol.XXI, No.2. hlm.73

⁶⁴ Shahram, A and Dara,C. 2016. *Iran in the World: President Rouhani;s Foreign Policy*. New York. Palgrave Macmillan. hlm.3

⁶⁵ Ibid., hlm. 5

2014.⁶⁶ Pada Februari 2015, Rouhani menyatakan bahwa “*we were able to bring down inflation from 40 percent to well below 16 percent . . . Iranian and foreign experts say what the government has done is more like a miracle from the economic viewpoint*”.⁶⁷ Signifikansi perekonomian Iran merupakan hal mengejutkan karena dalam periode yang sama harga minyak global mengalami penurunan yang tajam. Pendekatan kebijakan luar negeri dibawah rezim Hassan Rouhani yang berbeda mempengaruhi tekanan ekonomi Iran.

Perhatian dunia internasional terhadap ambisi nuklir Iran meningkat sejak era Ahmadinejad. Beberapa sanksi internasional yang diberikan oleh PBB, Amerika Serikat, dan komunitas internasional mampu melemahkan perekonomian Iran karena ketergantungannya pada ekspor minyak. Oleh karena itu, Hassan Rouhani mendeklarasikan akan menjadikan penyelesaian isu nuklir dalam agenda inti Pemerintahan. Pasca terpilih menjadi presiden Hassan Rouhani bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan nuklir, salah satu kebijakan yang dilaksanakan yaitu melakukan negosiasi dan akhirnya terbentuk ‘*interim agreement*’. Gaya kepemimpinan Hassan Rouhani lebih mengutamakan negosiasi dan penyelesaian secara damai. Upaya dilakukan oleh rezim ini untuk menghilangkan isolasi internasional dengan melakukan normalisasi hubungan eksternal Iran ditingkat internasional maupun regional.

⁶⁶ Nahid, K.2015. *Have international sanctions crippled Iran's auto industry?*. Diakses melalui <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/have-international-sanctions-crippled-irans-autoindustry>, pada 24 Juni 2019.

⁶⁷ Press TV. 2015. *Rouhani hails govt.'s economic job as 'miracle'*. Diakses melalui <https://www.presstv.com/Detail/2015/02/22/398752/Rouhani-hails-economic-job-as-miracle>, pada 24 Juni 2019.

4.2 Program Nuklir Iran

4.2.1 Awal Perkembangan Nuklir Iran

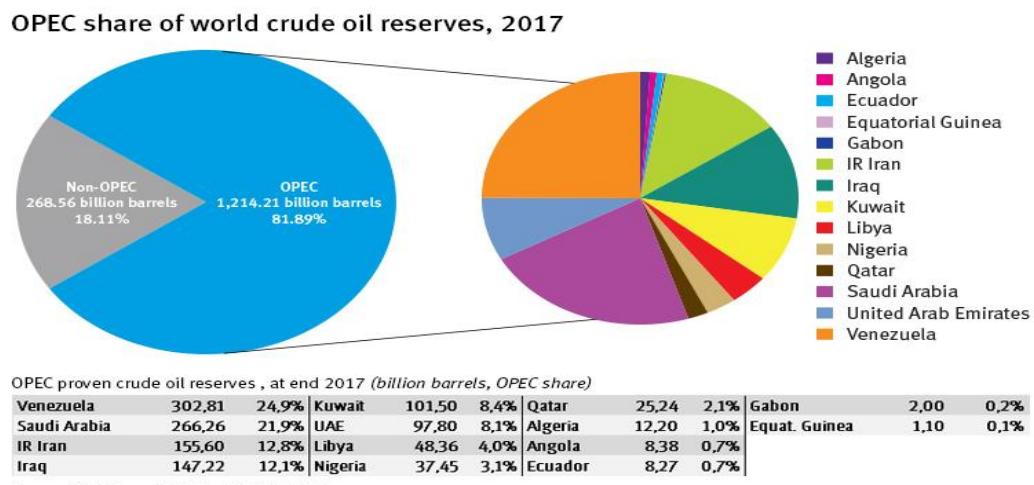
Perhatian komunitas internasional terhadap dampak yang akan ditimbulkan pengembangan persenjataan nuklir di daerah berpenduduk meningkat pasca perang dingin. Pencegahan persenjataan nuklir merupakan subyek resolusi pertama yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1946. Kepercayaan negara-negara akan kemampuan nuklir yang dapat dijadikan sebagai *deterrance* berdampak keinginan negara meningkatkan intensitas pengembangan program nuklir baik secara kuantitas maupun kualitas. Nuklir sebagai *deterrance* dapat diartikan sebagai kemampuan memberikan jaminan menangkal bentuk-bentuk agresi dan jaminan menjaga stabilitas keamanan yang lebih luas.⁶⁸ Doktrin *nuclear deterrence* menjadikan negara-negara yang sebelumnya tidak mengembangkan energi nuklir akhirnya memiliki keinginan untuk mengembangkannya. Kuantitas ketersediaan senjata nuklir yang dibangun oleh masing-masing negara adidaya mengalami peningkatan pada tahun 1986. Kekuatan destruktif dari masing-masing hulu ledak nuklir telah meningkat secara signifikan sejak senjata atom pertama digunakan dalam Perang Dunia Kedua di Hiroshima dan Nagasaki.⁶⁹

Iran merupakan salah satu negara yang mengembangkan energi nuklir setelah menandatangani perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat untuk tujuan sipil tahun 1957. Hal yang melatarbelakangi perjanjian ini karena kedekatan hubungan diplomatik antara Mohammad Reza Pahlavi dengan Amerika Serikat pasca Perang Dunia kedua. Bisa dikatakan bahwa Dinasti Pahlavi menjadi *founding father*

⁶⁸ John Borrie,et.al. 2017. *Understanding Nuclear Weapon Risks*. Geneva. The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). Hlm.20

⁶⁹ Max,R and Mohamed, N. *Nuclear Weapon*. Diakses melalui <https://ourworldindata.org/nuclear-weapons> pada 25 Juni 2019.

program nuklir Iran. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari Program “Atoms For Peace” yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower, tujuan dari program ini ialah pengembangan energi nuklir sipil yang bersifat damai. Melalui perjanjian tersebut Amerika Serikat menjual sebuah reaktor riset tipe ringan sebesar 5 megawatt. Reaktor yang terletak di daerah Teheran tersebut menjadi pondasi dasar program nuklir Iran.⁷⁰ Kemudian Iran membangun Pusat Penelitian Nuklir di Universitas Teheran pada tahun 1959. Selain pusat penelitian, Pemerintah Iran mendirikan badan resmi yang khusus mengatur program pengembangan energi nuklir yakni AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*). Seperti yang diketahui bahwa Iran merupakan negara yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya berbasis minyak, oleh karena itu dengan adanya kesempatan untuk mengembangkan energi nuklir dijadikan oleh Iran upaya untuk mengembangkan energi berbasis non-minyak. Berikut peneliti tampilkan data dari OPEC mengenai ketersediaan cadangan minyak di dunia.



Gambar 4.3 Cadangan Minyak Dunia

Sumber: OPEC Annual Statistical Bulletin 2018

⁷⁰ Peter, G. 2009. *It Was Uncle Sam who first gave Iran nuclear equipment*. Diakses melalui <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/1002/p04s01-usfp.html> pada 25 Juni 2019.

Berdasarkan data yang dihimpun dari OPEC *Annual Statistical Bulletin* tahun 2018 menyatakan bahwa Iran menempati posisi ketiga didunia sebagai negara pemilik cadangan minyak dunia dibawah Venezuela dan Arab Saudi. Jumlah cadangan minyak Iran pada tahun 2018 mencapai 255,26 juta barel atau sekitar 21,9 persen dari keseluruhan cadangan minyak dunia.⁷¹

Awal perkembangan program nuklirnya Iran mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Untuk meminimalisir kecurigaan komunitas internasional Iran menandatangani NPT pada 1 Juli 1968. Dalam artikel 4 NPT menyebutkan bahwa seluruh pihak yang menyepakati perjanjian ini memiliki hak termasuk Iran untuk mengembangkan program nuklir, menjalin kerjasama tanpa diskriminasi dan memperoleh peralatan, bahan, informasi ilmiah serta teknologi.⁷² Iran melakukan rencana strategis dalam upaya akselerasi program nuklirnya. Pada tahun 1970-an Pahlavi meluncurkan program ambisius pembangunan 23 reaktor tenaga nuklir dalam dua dekade. Tak hanya itu saja rencana lain yang dimiliki oleh rezim ini ialah membangun fasilitas bahan bakar nuklir seperti pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas. . Tujuan yang ditetapkan oleh rezim ini pada tahun 1974 ialah produksi energi nuklir Iran mencapai 23.000 megawatt dalam waktu dua puluh tahun.⁷³

⁷¹ Organization on the Petroleum Exporting Countries. *OPEC Share of World Crude Oil Reserves*. Diakses melalui https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm pada 23 Juni 2019

⁷² Departmenet for Disarmament Affairs. 2005. Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2019/04/23/iran-oil-sanctions-strait-of-hormuz-in-focus-as-oil-prices-rise.html>, pada 25 Juni 2019.

⁷³ Iran Watch.2016. *A History of Iran's Nuclear Program*. Diakses melalui <https://wwwiranwatch.org/our-publications/weapon-program-background-report/history-irans-nuclear-program> pada 27 Juni 2019.

Kemudian pada tahun 1974 Iran menandatangani perjanjian dengan perusahaan Jerman *Kraftwerk Union/Siemens*(KWU) untuk membangun nuklir di Busher. Iran juga menyepakati kontrak dengan perusahaan Prancis Framatome untuk membangun dua reaktor air nuklir dengan kekuatan 950 MW di wilayah Sungai Karoon pada tahun 1974. Iran dibawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi bergerak begitu cepat untuk pembangunan energi nuklir, pada tahun 1975 Pemerintah Iran membeli kurang lebih 10% saham di Eurodif

Proses perkembangan nuklir Iran yang berkembang pesat menimbulkan kekhawatiran Pemerintah Amerika Serikat. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut Iran berpartisipasi sebagai invenstor dalam program pengayaan uranium di AS. Iran juga menjadi investor pengayaan uranium di Prancis, menandatangi kontrak untuk pembangunan listrik tenaga nuklir dengan perusahaan Jerman dan Prancis. Meskipun begitu Iran secara perlahan mulai membangun kapasitas siklus bahan bakar nuklirnya sendiri dengan memulai penelitian dan pengembangan pengayaan laser uranium.⁷⁴ Kondisi internal negara Iran dibawah pengaruh Amerika Serikat mengalami gejolak, karena Amerika Serikat tidak hanya berkepentingan mengembangkan energi nuklir saja melainkan intervensi ke dalam sistem perpolitikan Iran. Gelombang revolusi mulai direncanakan oleh kelompok-kelompok oposisi dan masyarakat yang geram terhadap Pemerintah. Ayatollah Khomeini menjadi promotor gerakan revolusi ini, Mohammad Reza Pahlevi melarikan diri dan roda Pemerintahan dikendalikan oleh Khomeini.

⁷⁴ Saira,K. 2010. *Iran and Nuclear Weapons:Protracted Conflict and Proliferation*. New York. Routledge Taylor&Francis Group. Hlm.47

Stabilitas politik Iran mempengaruhi pengembangan nuklirnya, Amerika Serikat menarik kembali kesepakatan memasok uranium untuk reaktor riset Teheran.⁷⁵ Perdana Menteri Iran Shapur Bahktiar mengundurkan diri dari jabatannya, sebelum mengundurkan diri Shapur membatalkan kontrak kerjasama sebesar \$ 6,2 miliar untuk pembangunan dua pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah Bushehr. Secara resmi Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik, segala kebijakan Iran terkait program nuklir mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat seperti sanksi unilateral, sanksi internasional, dan pembatasan serta pelarangan keterlibatan Iran dalam ekonomi internasional. Pasca Revolusi Iran 1979 program nuklir Iran sempat dihentikan sementara. Namun dengan adanya tragedi Perang Irak-Iran 1980-1988, Ayatollah Khomeini mengambil sebuah keputusan untuk memulai kembali program nuklir Iran.

4.2.2 Kebijakan Program Nuklir Iran Pasca Revolusi 1979

Revolusi Iran 1979 merupakan berita buruk bagi program nuklir Iran karena sang pemimpin revolusi kala itu Ayatollah Khomeini memutuskan untuk memberhentikan sementara pengembangan nuklir Iran. Doktrin Politik yang dimiliki oleh Khomeini adalah pandangan anti Amerika Serikat, dan anti-islam yang mendukung Amerika Serikat menyebabkan sikap geopolitik Iran kala itu bersifat konfrotatif kepada negara-negara Teluk.⁷⁶ Khomeini mengklaim proyek program nuklir Iran yang dilakukan oleh Pemerintahan Shah bekerjasama dengan

⁷⁵ Nicholas, G. *Puler Goes to Egypt*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/1979/01/17/archives/ruler-goes-to-egypt-he-voices-hope-bakhtiar-government-can-make.html>, pada 25 Juni 2019

⁷⁶ Latorre, M.A. 2006. *Role of Revolutionary Leadership in Iran on its Foreign Policy*. Thesis. Florida. B.A University of Central Florida. Hlm. 59

Amerika Serikat dan pemborosan uang negara. Perang Iran-Irak tahun 1980-1988 merusak sumber daya dan infrastruktur nuklir Iran, dua reaktor daya nuklir yang sedang dibangun di Bushehr dibom beberapa kali. Dampak yang ditimbulkan yaitu Siemens selaku perusahaan yang membangun reaktor daya nuklir di Bushehr meninggalkan proyek tersebut. Peristiwa perang ini menyadarkan Pemerintah Iran akan kebutuhan energi nuklir. Pasca konstalasi perang Irak-Iran rezim memutuskan untuk mengubah pandangan politiknya dan mulai membangun kerjasama geopolitik strategis untuk membantu Iran dalam program nuklirnya.⁷⁷

Rencana strategis dilakukan oleh Pemerintah Iran untuk membangun fasilitas nuklirnya yang hancur akibat perang Irak-Iran. Khomeni sadar bahwa dengan melakukan pengembangan nuklir akan menjaga revolusi islam dari ancaman Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Iran pertama kali pasca revolusi islam yakni mengunjungi negara-negara dengan potensial sumber daya nuklir besar. Pada tahun 1985 rezim Khomeni memperoleh komponen inti dari Jaringan A.Q Khan, sebuah jaringan yang beroperasi untuk Pemerintah Pakistan dan bergerak pada pengembangan persenjataan nuklir. Perjanjian tersebut menyebutkan kewajiban Pakistan membangun 50.000 sentrifugal dengan tipe P-1, namun investigasi internasional mengetahui hal tersebut. Apabila pengembangan proyek itu terus berjalan maka Iran mampu membuat bahan produksi bom atom sekitar 30 setiap tahunnya.⁷⁸

⁷⁷ Wilkin,S. 2015. *Iran Considered Nuclear Weapons During 1980s Iraq War, ex-president says*. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-rafsanjani/iran-considered-nuclear-weapons-during-1980s-iraq-war-ex-president-says-idUSKCN0SN0E720151029> pada 28 Juni 2019

⁷⁸ Broad, J.W,et.al. 2004. *A Tale of Nuclear Proliferation: How Pakistani Built His Network*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2004/02/12/world/a-tale-of-nuclear-proliferation-how-pakistani-built-his-network.html> pada 28 Juni 2019

Upaya Iran tidak hanya membangun fasilitas nuklir baru saja, melainkan memperbaiki reaktor nuklir di wilayah Bushehr yang rusak akibat perang Iraq-Iran. Pada musim panas tahun 1982, Rafsanjani, Mehdi Bazargan, AEOI memulai negosiasi kembali yang bersifat rahasia dengan perusahaan Siemens. Namun tekanan dari Amerika Serikat terhadap Pemerintah Jerman memaksa perjanjian itu tidak bisa dilanjutkan. Tetapi perusahaan asal Spanyol dan Argentina membantu mengoperasikan reaktor yang dibangun oleh perusahaan Siemens. Berdasarkan bantuan yang diberikan Argentina kepada Iran memungkinkan keterlibatannya dalam pembangunan reaktor pembangkit Bushehr bersama dengan Spanyol. Keseriusan Pemerintah Iran untuk menggaet Argentina dibuktikan pengiriman delegasi pada November 1985 ke Buenos Aires. Negosiasi yang sangat panjang antara Iran dan Argentina membawa hasil karena pada 5 Mei 1987 *Argentine National Institute for Applied Research, Investigaciones Aplicadas* (INVAP) dan AEOI menandatangani investasi senilai \$5,5 juta untuk membangun reaktor inti uranium mencapai 20%.⁷⁹ Pemerintah Argentina memberikan uranium sebesar 115,8 kg dari pabrik pengayaan miliknya bernama Pilcanye.

Pada tahun 1990 Iran menandatangani perjanjian kerjasama nuklir jangka panjang dengan Pakistan dan Tingkok, dalam perjanjian ini Tingkok sepakat untuk memberikan *Miniature Neutron Source Reactor* (MNSR) dengan kekuatan 27KW dan dua reaktor daya 300 MW.⁸⁰ Tidak hanya dengan kedua negara itu saja, pada tahun 1995 Iran mencapai beberapa kesepakatan kerjasama dengan Rusia untuk pengembangan nuklirnya. Kesepakatan yang dicapai antara Iran-Rusia adalah

⁷⁹ Rezaei,F. 2017. *Iran's Nuclear Program A Study in Proliferation and Rollback*. Switzerland. Pallgrave Macmillan. hlm. 38

⁸⁰ The Nuclear Threat Initiative (NTI). 2018. *Nuclear Iran*. Diakses melalui <https://www.nti.org/learn/countries/iran/nuclear/> pada 28 Juni 2019

pembanguna dua fasilitas reaktor air listrik (VVER-1000 950-1.073 MWe) ringan di Bushehr dengan total investasi sebesar \$ 780 juta.⁸¹ Dalam perjanjian tersebut Rusia menginginkan bahan *spent fuel* dikirim kembali ke Rusia untuk diproses kembali untuk mengekstraksi plutonium sehingga dapat digunakan Iran untuk memperoduksi senjata nuklir. Dua kali percobaan dilakukan oleh Iran pada fasilitas sentrifugal yang dipasang di Kalaye Electric Company tahun 1992 dan 2002, fasilitas tersebut merupakan hasil dari penelitian dan pengembangan rahasia Pemerintah Iran dengan menggunakan alat UF6 milik Tingkok.⁸² Pasokan alat dari Tingkok ini merupakan implementasi perjanjian antara Iran dan Tingkok pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 Iran secara rahasia mengimpor satu metrik ton uranium hexafluoride.

Perjuangan Pemerintah Iran untuk melakukan pengembangan program nuklir menuai hasil. Hal tersebut tidak terlepas dari sinergi dan strategi kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin Iran. Setiap pemimpin tentu memiliki pendekatan yang berbeda-beda untuk mengembangkan program nuklir Iran. Pada tahun 1998 Pemerintah Iran menyatakan lebih dari 15 fasilitas dan instalasi baru dimiliki oleh Iran.⁸³ Beberapa fasilitas instalasi energi nuklir yang dimiliki oleh Iran antara lain; sepuluh tambang uranium di daerah Yazd, Khorrasan, Baluchestan, Harmozgan, Bandar E-Abbas, Bandar E-Langeh, dan Pusat Nuklir Karaj yang difungsikan sebagai penelitian riset medis dan agrikultur. Selain itu

⁸¹ Federation of American Scientists. *Bushehr Iran Nuclear Facility*. Diakses melalui <https://fas.org/nuke/guide/iran/facility/bushehr.htm> pada 28 Juni 2019.

⁸² Albrirght, D, Adrea, Stricker. *Iran's Nuclear Program*. Diakses melalui <https://iranprimer.usip.org/resource/irans-nuclear-program> pada 28 Juni 2019.

⁸³ International Atomic Energy Agency. 2011. *Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council Resolutions in the Islamic Republic of Iran*. Report by the Director General. GOV/2011/65. Hlm. 2

terdapat Laboratorium Ibnu Haytam yang difungsikan sebagai pusat penelitian laser, *Bonab Atomic Energi Research Center* yang difungsikan sebagai pengembangan teknologi Agrikultur, Fasilitas nuklir medis di Isfahan, dua reaktor di wilayah Bushehr.

Kemudian terdapat pusat pengayaan Uranium di Natanz, pusat ekstraksi bijih uranium di Saghond, fasilitas reaktor air di wilayah Arak, dan *Teheran Nuclear Research Center* dengan kemampuan produksi 600 gram plutonium tiap tahunnya. Memasuki tahun 2000-an perkembangan program nuklir Iran terkendala akibat tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Terutama kerjasama dengan Rusia terhambat sejak tahun 2002-2004. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Rusia akan membantu Iran untuk membuat senjata pemusnal massal berbahan nuklir. Berikut peneliti akan menampilkan peta persebaran fasilitas nuklir Iran. Keberadaan fasilitas nuklir Iran memiliki fungsi yang berbeda-beda.



Gambar 4.3 Peta Fasilitas Nuklir Iran

Sumber: The Guardian diakses dari
<https://www.theguardian.com/world/2008/sep/25/iran.israelandthepalestinians1>

Propaganda yang dihadapi oleh Iran yakni pengembangan program nuklirnya bukan untuk tujuan damai melainkan digunakan sebagai pengembangan senjata pemusnah massal. Melalui media-media, dan badan intelejen Amerika Serikat merilis laporan-laporan yang menyatakan program nuklir Iran sangat mencurigakan karena ditujukan untuk memproduksi senjata pemusnah massal sehingga akan menimbulkan keresahan keamanan dan stabilitas Timur Tengah.⁸⁴ Propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui laporan-laporan intelejen yang dipublikasikan dimedia massa tersebut bertolak belakang dengan pernyataan resmi IAEA dan PBB. Pada tahun 2002 Koffi Annan selaku Sekjen PBB tidak menjustifikasi program nuklir Iran untuk tujuan pengembangan senjata pemusnah massal melainkan mengimbau Iran untuk mengikuti aturan NPT , IAEA, dan memberhentikan sementara pengayaan uranium.⁸⁵

Perubahan kebijakan program nuklir Iran berubah saat Mahmoud Ahmadinejad menjadi presiden pada tahun 2005. Pendekatan yang digunakan oleh Ahmadinejad ialah radikal, yang mana kebijakannya cenderung konfrontatif. Tujuan awal dari pengembangan program nuklir Iran dibawah kepemimpinan Ahmadinejad yakni bernegosiasi dengan negara-negara Eropa dan IAEA sehingga mendapatkan hak pengakuan atas program nuklirnya untuk tujuan damai. Namun para pejabat kebijakan luar negeri Iran percaya tujuan dari negara-negara Eropa dan AS bukan untuk penagguhan melainkan menghentikan keseluruhan program

⁸⁴ Geoffrey Kemp, et.al. 2001. *Iran's Nuclear Weapons Options*. Washington. The Nixon Center. Hlm. 1. Diakses melalui <https://carnegieendowment.org/pdf/npp/nixoniranwmd.pdf> pada 28 Juni 2019.

⁸⁵ Koffi, A. 2006. *Nuclear Non-Proliferation Treaty Faces Crisis of Compliance, Confidence, says Kofi Annan in address to University of Tokyo*. Diakses melalui <https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2006-05-18/nuclear-non-proliferation-treaty-faces-crisis-compliance-confidence> pada 29 Juni 2019.

nuklirnya.⁸⁶ Oleh karena itu rezim tersebut memutuskan untuk mengubah orientasi kebijakan luar negeri.

Iran menyatakan bahwa negara-negara Eropa melanggar komitmen didalam Perjanjian Paris. Pada tahun 2006 secara resmi Pemerintah Iran melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal IAEA bahwa mereka akan melanjutkan aktivitas di fasilitas konversi uranium Isfahan, Natanz, dan Parsh Tash dibawah pengawasan IAEA. Iran melalui juru bicara Dewan Tinggi Keamanan Nasional mendeklarasikan akan memulai kembali negosiasi dengan Rusia perihal kelanjutan program nuklirnya⁸⁷. Langkah tersebut menimbulkan respon keras dari negara-negara Eropa terutama Inggris dan Amerika Serikat. Keresahan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman terhadap program nuklir Iran memunculkan sebuah gagasan untuk membawa permasalahan ini kedalam Dewan Keamanan PBB. Respon dari Dewan Keamanan PBB yakni pada 31 Juli 2006 menerbitkan Resolusi 1696, dalam resolusi tersebut menyatakan kewajiban Iran menghentikan keseluruhan aktifitas pengayaan uranium.⁸⁸

4.3 Kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*

Kesepakatan nuklir Iran atau biasa dikenal dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) merupakan hasil dari negosiasi negara P5+1⁸⁹,

⁸⁶ Yousefi, A.M. 2010. *Iran's Foreign Policy during Ahmadinejad: From Confrontation to Accommodation*. Tehran. Shahid Beheshti University. Hlm.8-9

⁸⁷ Weisman, S.R and Nazila Fati. 2006. *Iranian Reopen Nuclear Centers*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2006/01/11/world/middleeast/iranians-reopen-nuclear-centers.html?mtrref=www.google.com&gwh=23290007D9498D958BD4AA024C81D421&gwt=pay> pada 29 Juni 2019.

⁸⁸ United Nations Security Council Resolutions. 2006. *Resolution 1696: Non-Proliferation*. Diakses melalui <http://unscr.com/en/resolutions/1696#> pada 29 Juni 2019

⁸⁹ Istilah negara-negara yang terlibat dalam negosiasi kesepakatan nuklir Iran *Joint Comprehensive Plan of Action* antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Tingkok

yang disepakati pada 14 Juli 2015 di Wina. Kemudian kesepakatan tersebut disahkan oleh Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB. Proses negosiasi yang dilakukan kurang lebih dua tahun dari tahun 2013-2015 dan pasca 13 tahun kegiatan nuklir rahasia Iran diketahui oleh komunitas internasional. JCPOA tidak terjadi begitu saja, terdapat negosiasi-negosiasi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Diawali dengan negosiasi Iran dengan EU-3 (Prancis, Jerman, dan Inggris) pada tahun 2003, kesepakatan ini dikenal dengan sebagai Deklarasi Teheran. Secara garis besar inti dari deklarasi tersebut ialah Iran sepakat untuk menangguhkan seluruh pengayaan uraniumnya, EU-3 mengakui program nuklir Iran untuk tujuan damai dan membantu dalam pengembangan program nuklir Iran.⁹⁰

Kemudian pada tahun 2006 negara-negara P5+1 mengupayakan jalur diplomasi untuk mencegah Iran mengembangkan energi nuklir. Pergantian pemimpin Iran kala itu yakni Mahmoud Ahmadinejad mengubah arah kebijakan program nuklir Iran dan menolak proposal negosiasi yang diajukan oleh negara-negara P5+1. Namun negara-negara P5+1 tidak berhenti begitu saja, pada tahun 2008 mengajukan proposal kembali kepada Iran dan dalam proposal perjanjian tersebut menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak akan menatuhkan sanksi kepada Iran. Tetapi respon dari Iran selalu menolak proposal negosiasi yang diajukan oleh negara-negara P5+1. Sikap Iran berdampak pada sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 1929 secara signifikan memperluas sanksi program nuklir Iran. Selain itu terdapat sanksi terkait proliferasi, melarang Iran melakukan tes rudal balistik berbahan nuklir, dan

⁹⁰ Mazzucelli,C.2007. *EU3-Iranian Nuclear Diplomacy: Implications for US Policy in the Middle East*. Miami. European Union Miami Analysis. Hlm.5

memberlakukan embargo perdagangan senjata ke Iran.⁹¹ Sanksi lain yang diberikan kepada Iran ialah negara-negara Uni Eropa dilarang melakukan impor minyak dari Iran sejak tahun 2011

Saat negara-negara P5+1 gencar melakukan negosiasi dalam mencegah program nuklirnya, Iran justru semakin masif mengembangkan nuklirnya.⁹² Rencana negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara P5+1 dengan Iran belum menuai hasil. Oleh karena itu melalui Dewan Keamanan PBB mengadopsi beberapa resolusi untuk memberikan sanksi terhadap Iran. Melalui Resolusi 1929 yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada Juni 2010 mewajibkan Iran sepenuhnya bekerjasama dengan penyelidikan IAEA terhadap program nuklirnya, menunda program pengayaan uranium, menunda pembangunan reaktor air berat dan proyek-proyek lainnya, meratifikasi Protokol Tambahan untuk perlindungan IAEA, mewajibkan Iran tidak mengembangkan nuklir untuk persenjataan rudal balistik.⁹³

Saat memasuki tahun 2013 Iran melaksanakan pemilihan presiden, pada saat itu Hassan Rouhani terpilih menjadi Presiden untuk menggantikan Mahmoud Ahmadinejad. Pergantian pemimpin Iran menyebabkan perubahan arah kebijakan luar negeri dan disisi lain Presiden Amerika Serikat saat itu adalah Barack Obama. Pada November 2013 Iran dan negara P5+1 memulai negosiasi kembali setelah pelantikan Rouhani sebagai Presiden Iran dan pelantikan Mohammed Javad Zarif sebagai Menteri Luar Negeri Iran yang baru. Kerangka perjanjian fase pertama berisi tentang melarang segala jenis program nuklir Iran untuk tujuan persenjataan,

⁹¹ Davenport, K. 2019. *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*. Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran> pada 2 Juli 2019

⁹² Ibid.,

⁹³ Security Council. 2010. *Security Council Imposes Additional Sanctions on Iran, Voting 12 in Favour to 2 Against, with 1 Abstention*. Diakses melalui <https://www.un.org/press/en/2010/sc9948.doc.htm> pada 2 Juli 2019.

meningkatkan *monitoring* oleh IAEA kemudian melaporkan mengenai kepatuhan Iran terhadap peraturan yang sudah ada.⁹⁴ Setiap enam bulan sekali kesepakatan tersebut akan dievaluasi oleh negara P5+1, dan kemudian akan diputuskan apakah diperpanjang atau tidak. Keuntungan yang diperoleh Iran yakni keringanan sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai arus pedagangan minyak, emas, logam mulia, industri otomotif Iran, komitmen untuk tidak memberikan sanksi apapun selama Iran patuh terhadap perjanjian tersebut, pengembalian dana repatriasi Iran yang dibekukan oleh Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama *Interim Agreement* atau *Joint Plan of Action* (JPA).⁹⁵

Kepatuhan dan komitmen yang ditunjukkan oleh Iran terhadap kesepakatan JPA berdampak pada keinginan DK PBB, Uni Eropa, dan rezim Iran melanjutkan negosiasi untuk menyempurnakan poin-poin perjanjian sehingga semakin menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian Iran dan negara P5+1 melakukan negosiasi untuk menyusun sebuah gagasan perjanjian perihal keringanan sanksi permanen yang diberikan kepada Iran dan timbal balik dari itu ialah kewajiban Iran untuk membatasi pengayaan nuklirnya, kapasitas dan lokasi fasilitas pengayaan nuklir Iran⁹⁶. Negosiasi tersebut telah dimulai sejak Februari 2014 tetapi dalam proses pelaksanaan belum menemui titik temu. Hingga pada akhirnya kesepakatan tersebut tercapai di Vienna pada tanggal 14 Juli 2015 dan dikenal dengan *Joint*

⁹⁴ Arms Control. Section 2: *The November 2013 Interim Agreement*. Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/reports/Solving-the-Iranian-Nuclear-Puzzle-The-Joint-Comprehensive-Plan-of-Action/2015/08/Section-2-The-November-2013-Interim-Agreement> pada 3 Juli 2019

⁹⁵ George, M. 2013. *Interim Nuclear Agreement Between Iran and Six Powers*. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-agreement-text/interim-nuclearagreement-between-iran-and-six-powers-idUSBRE9AN0FS20131124> pada 3 Juli 2019

⁹⁶ Kenneth. K, Paul K.Kerr. 2016. *Iran Nuclear Agreement*. Congressional Research Service. Hlm. 8

Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Secara garis besar kesepakatan JCPOA berisi beberapa poin:⁹⁷

1. *Enrichment, Enrichment Research and Development, Stockpile*

Pada poin pertama kesepakatan JCPOA menyatakan bahwa kewajiban Iran untuk membatasi keseluruhan pengayaan uranium dan segala hal yang berkaitan dengan uranium. Termasuk membatasi penelitian dan pengembangan yang terkait dengan uranium. Secara bertahap Iran mulai mengikuti standarisasi internasional perihal pengembangan uranium dibawah 300 kg atau maksimal 3.67%.

2. *Arak, Heavy Water, Reprocessing*

Kesepakatan JCPOA mengatur modernisasi dan pembangunan ulang reaktor penelitian di Arak, hal itu bertujuan agar pengembangan nuklir Iran hanya untuk tujuan damai, kesehatan, dan industri bukan untuk pengembangan persenjataan pemusnah massal. Pelarangan penambahan fasilitas *heavy water* selama 15 tahun, dan pemberian izin ekspor apabila hasil produksi *heavy water* melebihi batas.

3. *Transparrency and Confidence Building Measures*

Iran harus patuh dan dapat bekerjasama dengan pengawasan yang dilakukan oleh IAEA. Hal-hal yang akan diawasi oleh IAEA antara lain: pengawasan produksi konsentrat bijih uranium selama 25 tahun, penahanan dan

⁹⁷ *Joint Comprehensive Plan of Action*. Diakses melalui www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf pada 7 Juli 2019

pengawasan *centrifuge rotors*, pemberian izin dan sertifikasi modernisasi teknologi terkait program nuklir yang dilakukan oleh Pemerintah Iran.

4. *Sanctions*

Saat kesepakatan JCPOA belum terbentuk, Dewan Keamanan PBB mengesahkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran seperti Resolusi 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010), dan 2231 (2015). Namun ketika JCPOA disepakati oleh negara P5+1 dan Iran maka Dewan Keamanan PBB menghentikan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam resolusi tersebut. Dampak positif yang didapatkan Iran atas kesepakatan JCPOA yakni keringanan sanksi embargo ekonomi, karena selama ini Iran dilarang melakukan perdagangan internasional dengan sekutu dagang Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Beberapa keringanan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa; pemberian izin perdagangan sektor energi Iran bagi sekutu dagang Uni Eropa dan Amerika Serikat, kegiatan perbankan termasuk perencanaan kerjasama perbankan, pembukaan cabang baru dan anak perusahaan bank Iran di wilayah anggota Uni Eropa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Kepentingan Nasional Iran dalam *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* tahun 2015-2017 antara lain :

1. Keputusan Iran menyepakati JCPOA dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal. Mengingat pada masa sebelumnya sikap pemerintah Iran cenderung agresif sehingga berdampak pada peningkatan sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat terhadap Iran. Sejak Hassan Rouhani dilantik menjadi presiden tahun 2013, stabilitas perekonomian internal Iran terganggu akibat sanksi yang diberikan oleh komunitas internasional. Latar belakang yang dimiliki Rouhani sangat mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Meskipun sejak kecil sangat dekat dengan ajaran-ajaran syiah, tetapi saat menempuh pendidikan tinggi Rouhani dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Barat. Oleh karena itu politik luar negeri Iran pada masa Rouhani lebih terbuka dan mengutamakan negosiasi dibandingkan menggunakan tindakan konfrontatif. Jika kondisi sanksi dibiarkan begitu saja maka akan berdampak buruk bagi stabilitas negara

Iran. Atas dasar pertimbangan itu Rouhani merasa perlu untuk menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.

2. Setiap negara tentu memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai, untuk mencapai itu negara perlu mempertimbangkan kondisi apa yang terjadi di internal negara maupun eksternal negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kepentingan nasional yang dimiliki oleh Iran yang berkaitan langsung dengan JCPOA antara lain kepentingan ekonomi, pertahanan, dan ideologi. Sebagai negara dengan cadangan minyak mentah terbesar ketiga didunia Iran merasa perlu untuk memaksimalkannya. Namun demikian upaya tersebut terhenti saat Iran mendapatkan sanksi dari komunitas internasional. Oleh karena itu Iran menyepakati JCPOA untuk menghilangkan sanksi ekonomi tersebut. Dampak langsung yang didapatkan oleh Iran atas kesepakatan tersebut adalah penghapusan resolusi-resolusi DK PBB, sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa, perizinan perdagangan internaional, dan pengembalian aset asing. Kepentingan bidang pertahanan ialah pengembangan rudal balistik sebagai salah satu entitas postur militer untuk mempertahankan kapabilitas power di kawasan Timur Tengah. Sebab didalam JCPOA tidak ada peraturan mengenai pengembangan rudal balistik, maka Iran memanfaatkannya untuk mengembangkannya. Perkembangan rudal balistik Iran mengalami peningkatan, hal itu dapat dibuktikan dengan peningkatan ujicoba rudal balistik dari tahun 2015 hingga 2017. Kepentingan pada aspek ideologi adalah keinginan Iran untuk mencapai status quo hegemon di kawasan Timur Tengah. Penghapusan sanksi-sanksi dari komunitas internasional

menyebabkan keleluasan Iran untuk menjalin kerjasama dan terlibat dalam proyek-proyek negara lain. Percobaan rudal balistik Iran menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat karena perkembangan jarak jangkau rudal balistik Iran hingga ke Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.

6.2 Saran

Berdasarkan studi literatur dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kepentingan nasional Iran didalam kesepakatan JCPOA tahun 2015-2017 , maka peneliti memberikan saran pemerintah Iran dimasa yang akan mendatang mengantisipasi kemungkinan bagi negara-negara yang terlibat menarik diri dari perjanjian tersebut. Terutama negara Amerika Serikat yang sebentar lagi akan mengalami pergantian pemimpin, tentu setiap pemimpin memiliki sikap politiknya masing-masing. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah Iran untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah menjalin hubungan erat dengan negara yang memiliki kapabilitas perekonomian serta pertahanan kuat seperti Tiongkok. Kemudian pemerintah Iran memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami gejolak internal. Karena hal tersebut akan memperkuat posisi strategis Iran dikawasan Timur Tengah.

Jika pada aspek ekonomi, pemerintah Iran dapat memanfaatkan peningkatan iklim bisnis negaranya untuk memperluas perdagangan internasional maupun memperluas transfer teknologi negara-negara maju kepada Iran. Pemerintah Iran dapat memulainya dengan mengurangi ketergantungan akan sumber daya minyak. Begitu banyak sumber daya yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Iran antara lain industri otomotif, produk mineral non-logam, dan petrokimia.

Apabila dalam aspek *research and development*, mengingat potensi yang dimiliki oleh Iran cukup besar terkait energi nuklir, maka dapat dimanfaatkan dengan menjalin kerjasama pengembangan *research and development* dengan negara-negara maju seperti Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Mengingat kesepakatan JCPOA memberikan ruang kepada pemerintah Iran untuk menjalin hubungan dengan negara lain sekalipun dengan mitra dagang Amerika Serikat. Maka dengan begitu dapat mendukung kampanye pemerintah Iran terkait kapabilitas nuklirnya untuk tujuan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abrahamian.E.2008.*A History Modern Iran*. New York. Cambridge University Press
- Alan,Bryman.2012. *Social Research Methods*, 4th Edition. New York. Oxford University Press
- Alex Mintz, Karl DeRouen. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*.New York Cambridge University Press
- Behraves,M.2010. *Iran and Britain: The Politics of Oil and Coup D'état before the Fall of Reza Shah*.
- Colin S.Gray.1999.*The Second Nuclear Age*. Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Collins, Nancy. 1995. *A Legacy of Strength and love (Interview with Clinton)*. Good Housekeeping.
- Hans J. Morgenthau.1949. *Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace*. New York. Alfred A Knoff.
- Helen C.M. 2008. *Iran a Country Study History of Iran*. Handbook Series, Fifth Edition, First Printing. Federal Research Divison Library of Congress.
- Hudson, Valerie M.2008. *The History and Evolution Foreign Policy Analysis*. Dalam Foreign Policy: Theories: Actor, Case, ed. Steve Smith et.al. New York: Oxford University Press
- James N. Rosenau. 1981.*The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York, Nichols Publishing.
- Janet Heaton. 2004. *Reworking Qualitative Data*. London. SAGE Publications Ltd.
- John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Joseph.J.S, Naghshpour.S. 2011. *Revolutionary Iran and the United States Low. Intensity Conflict in the Persian Gulf*.England.Ashgate Publishing Limited.

- Kasra, N.2008. *The Secret History of Iran Radical Leader*.California. University of California Press.
- Lisa Harrison Dan Theresa Callan. 2013.*Key Research Concept In Politics and International Relations*. London. SAGE Publications Ltd.
- Liz Spencer, et.al. 2003. *Quality in Qualitation Evaluation : A Framework For Assessing Research Evidence*.London. The Cabinet Office.
- Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hlml, Inc., Englewood Cliffs.
- Maaike,W. 2013. *Iranian Foreign Policy During Ahmadinejad: Ideology and Actions*. United States. Palgrave Macmillan.
- Miles, B Matthew dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California. Sage Publication.
- Osiewicz, P. 2014. *The Iranian Foreign Policy in The Persian Gulf Region Under The Rule of President Hassan Rouhani: Continuity or Change*. Polandia. University of Poznan.
- Rezaei,F. 2017. *Iran's Nuclear Program A Study in Proliferation and Rollback*. Switzerland. Pallgrave Macmillan.
- Robert Jackson dan Georg Sørensen. 2014. *Introduction to International Relations:Theory and Approach, Fifth Edition*. United Kingdom.Oxford University.
- Sadjadpour,K. 2009. *Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader*. New York.Carnegie Endowment For International Peace.
- Saira,K. 2010. *Iran and Nuclear Weapons:Protracted Conflict and Proliferation*. New York. Routledge Taylor&Francis Group.
- Shahram, A and Dara,C. 2016. *Iran in the World: President Rouhani;s Foreign Policy*. New York. Palgrave Macmillan.
- Talinn,G.2016. *Political Landscapes of Capital Cities: Tehran A Revolution Making*. University Press of Colorado.
- Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*.London. Prentice Hall International.

Wyn Bowen,dkk. 2016. *Living On The Edge: Iran and the Practice of Nuclear Hedging*. London. Palgrave Macmillian.

Yousefi, A.M. 2010. *Iran's Foreign Policy during Ahmadinejad: From Confrontation to Accommodation*. Tehran. Shahid Beheshti University.

Jurnal :

Behestani, B and Shahidan, M.H. 2015. *Twin Pillars Policy : Engangement of US-Iran Foreign Affairs during the Last Two Decades of Pahlavi Dynasty*. Asian Social Sciense; Vol.11, No.2.

Clifton, W.S. 2014. *Why Hassan Rouhani Won Iran's 2013 Presidential Election*. Middle East Policy, Vol.XXI, No.2.

Hudson, V.M. 2005. *Foreign Policy Anlaysis: Actor-Specific Theort and the Ground of International Relation*. Foreign Policy Analysis 1, no.1.

Kaya,S and Zeynep Sartepe. 2015. *Contentious Politics in Iran: Factions, Foreign Policy and the Nuclear Deal*. Journal Vol. 14, No. 3, Fall. Turkish Journal of International Relations.

Takeyh.R.2004. *From Reform to Revolution ?*. Journal vol.46, no.1, Spring. The International Institute for Strategic Studies.

Taleghani.I.2017. *Reza Shah's Role in the Collapse of Iran's Constitutional Movement* . International Journal of Scientific Study Vol.4 Issue 4.

Report/Working Paper :

Atallah S. Al Sarhan. 2017. *United States Foreign Policy and the Middle East*. Atlanta. Scientific Research Publishing.

Castiglioni,C. 2013. *Obama's Policy Toward Iran: Comparing First and Second Term*. Analysis No. 220. Instituto Per Gli Studi Di Political Internazionale.

Claudia, C. 2013. Obama's Policy Toward Iran: Comparing First and Second Term

Economist Intelligence Unit.2012. *Oil Sanctions on Iran: Cracking Under Pressure ? A Special Report from The Economist Intelligence Unit*. London.

Einhorn, R. Vann H.Van. 2019. *Constraining Iran's Missile Capabilities*. Washington. The Brooking Institution.

Imam.Khomeini. *Governance of The Jurist (Velayat-e Faqeeh): Islamic Government*. Tehran. The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Division).

International Atomic Energy Agency. 2011. *Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council Resolutions in the Islamic Republic of Iran*. Report by the Director General. GOV/2011/65.

International Crisis Group. 2018. *Iran's Priorities in a Turbulent Middle East*. Belgium.

International Monetary Fund (IMF).2016. *Islamic Republic of Iran. Article IV Consultation, Press Release IMF Country Report No.17/62.*

Izewicz, P. 2017. *Iran's Ballistic Missile Program: Its Status and The Way Forward*. Stockholm. Non-Proliferation Papers No.57. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

John Borrie,et.al. 2017. *Understanding Nuclear Weapon Risks*. Geneva. The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

Katzman, K. 2019. *Iran sanctions*. Congressional Research Service

Kenneth, K and Paul K.Kerr. 2016. *Iran Nuclear Agreement*. Congressional Research Service.

Latorre, M.A. 2006. *Role of Revolutionary Leadership in Iran on its Foreign Policy*. Thesis. Florida. B.A University of Central Florida.

Macaluso, A. 2014. *The Apparent Success of Iran Sanctions*. Working Paper. Netherland. The Hague Institute.

Mazzucelli,C.2007. *EU3-Iranian Nuclear Diplomacy: Implications for US Policy in the Middle East*. Miami. European Union Miami Analysis.

Mousavia, S. 2014. *Iran: Assessing New, Emerging Geopolitics in the Middle East*. Mediterranean Yearbook.

Naghmeh, S. 2009. *The Curious Case of Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani*. Massachusetts. Crown Center for Middle East Studies.

Office of Foreign Assets Control U.S Department of the Treasury. 2014. *Terrorist Assets Report*.

Paul K. Ker, Kenneth. K. 2018. *Iran Nuclear Agreement and U.S Exit*. Congressional Research Service.

United Nations. 2015. *Statement by H.E Dr. Hassan Rouhani*. General Debate of General Assembly of the United Nations.

US Treasury Department. *CISADA: The New U.S Sanctions on Iran*

Vaezi, A. 2004. *Shia Political Thought*. Islamic Centre of England

Sumber Online :

Albright, D and Adrea Stricker. *Iran's Nuclear Program*. Diakses melalui <https://iranprimer.usip.org/resource/irans-nuclear-program>.

Al-Jazeera. 2017. *Profile: Iran's President Hassan Rouhani*. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/2013616191129402725.html>.

Arms Control. *Section 2: The November 2013 Interim Agreement*. Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/reports/Solving-the-Iranian-Nuclear-Puzzle-The-Joint-Comprehensive-Plan-of-Action/2015/08/Section-2-The-November-2013-Interim-Agreement>.

Barfi, B. 2016. *The Real Reason Why Iran Backs Syria*. Diakses melalui <https://nationalinterest.org/feature/the-real-reason-why-iran-backs-syria-14999>.

Bayoumy, Y. 2014. *Iran's Khamenei says West's calls to limit missiles 'stupid'*. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-iran-khamenei/irans-khamenei-says-wests-calls-to-limit-missiles-stupid-idUSBREA4A05U20140511>.

Biography of Dr.Hassan Rouhani. Diakses melalui <http://www.president.ir/en/president/biography>.

Broad, J.W,et.al. 2004. *A Tale of Nuclear Proliferation: How Pakistani Built His Network*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2004/02/12/world/a-tale-of-nuclear-proliferation-how-pakistani-built-his-network.html>.

Central Bank of The Islamic Republic of Iran. *The Consumer Price Index (CPI) and Inflation*. Diakses melalui https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_en.aspx.

Central Bank of The Islamic Republic of Iran. 2014. *Annual Review 1392 (2013/2014)*. Diakses melalui https://www.cbi.ir/simplelist/AnnualReview_en.aspx.

Coles, I. 2013. *Iran's Rouhani says economic problem go beyond sanctions*. Diakes melalui <https://www.reuters.com/article/us-iran-economy-idUSBRE9AQ0AU20131127>.

Davenport, K. 2019. *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*. Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran>.

Departmenet for Disarmament Affairs. 2005. Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2019/04/23/iran-oil-sanctions-strait-of-hormuz-in-focus-as-oil-prices-rise.html>.

Federation of American Scientists. *Bushehr Iran Nuclear Facility*. Diakses melalui <https://fas.org/nuke/guide/iran/facility/bushehr.htm>.

General View About Iran. Ministry of Foreign Affairs. Diakses melalui <http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=2140>.

Geoffrey Kemp, et.al. 2001. *Iran's Nuclear Weapons Options*. Washington. The Nixon Center. Hlm. 1. Diakses melalui <https://carnegieendowment.org/pdf/npp/nixoniranwmd.pdf>.

George, M. 2013. *Interim Nuclear Agreement Between Iran and Six Powers*. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-agreement-text/interim-nuclear-agreement-between-iran-and-six-powers-idUSBRE9AN0FS20131124>.

Iran Watch. 2012. *A History of Iran's Ballistic Missile Program*. Diakses melalui <https://wwwiranwatch.org/our-publications/weapon-program-background-report/history-irans-ballistic-missile-program>.

Iran Watch. 2016. A History of Iran's Nuclear Program. Diakses melalui <https://wwwiranwatch.org/our-publications/weapon-program-background-report/history-irans-nuclear-program>.

Iran Watch. 2016. *A History of Iran's Nuclear Program*. Diakses melalui <https://wwwiranwatch.org/our-publications/weapon-program-background-report/history-irans-nuclear-program>.

Koffi, A. 2006. *Nuclear Non-Proliferation Treaty Faces Crisis of Compliance, Confidence, says Kofi Annan in address to University of Tokyo*. Diakses melalui <https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2006-05-18/nuclear-non-proliferation-treaty-faces-crisis-compliance-confidence>.

Malus. K. 2018. *From "Atom for Peace" to "JCPOA": History of Iranian Nuclear Development*. New York. Columbia University. Diakses melalui <https://k1project.columbia.edu/content/atoms-peace-jcpoa-history-iranian-nuclear-development>.

Max,R and Mohamed, N. *Nuclear Weapon*. Diakses melalui <https://ourworldindata.org/nuclear-weapons>.

Meredith, S. 2019. *Could Iran Close The Strait of Hormuz ? Energy Analysts Skeptical of Tehran's Latest Threat*. Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2019/04/23/iran-oil-sanctions-strait-of-hormuz-in-focus-as-oil-prices-rise.html>.

Nader, Alireza. 2013. *Iran : A Rough Year in 2013*. Diakses melalui <https://iranprimer.usip.org/blog/2013/jan/02/iran-rough-year-2013>.

Nahid, K.2015. *Have international sanctions crippled Iran's auto industry?*. Diakses melalui <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/have-international-sanctions-crippled-irans-autoindustry>.

Nicholas,G. *Puler Goes to Egypt*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/1979/01/17/archives/ruler-goes-to-egypt-he-voies-hope-bakhtiars-government-can-make.html>.

Nikaeen, S.2013. *Tercekiknya Perkonomian Iran*. Diakses melalui <https://www.dw.com/id/tercekiknya-perekonomian-iran/a-16876297>.

Nuclear Threat Initiative. 2017. Natanz Enrichment Complex. Diakses melalui <https://www.nti.org/learn/facilities/170/>.

Organization on the Petroleum Exporting Countries. *OPEC Share of World Crude Oil Reserves*. Diakses melalui https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm.

Peter, G. 2009. *It Was Uncle Sam who first gave Iran nuclear equipment*. Diakses melalui <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/1002/p04s01-usfp.html>.

Press TV. 2015. *Rouhani hails govt.'s economic job as 'miracle'*. Diakses melalui <https://www.presstv.com/Detail/2015/02/22/398752/Rouhani-hails-economic-job-as-miracle>.

Rezaian, J. 2013. *Iran's supreme leader formally endorses Hassan Rouhani as president*. Diakses melalui https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/irans-supreme-leader-formally-endorses-hassan-rouhani-as-president/2013/08/03/31660d22-fc53-11e2-89f7-8599e3f77a67_story.html?noredirect=on&utm_term=.d960cf95fc0c.

Security Council. 2010. *Security Council Imposes Additional Sanctions on Iran, Voting 12 in Favour to 2 Against, with 1 Abstention*. Diakses melalui <https://www.un.org/press/en/2010/sc9948.doc.htm>.

Ted,R and Alia, C. 2018. *Major Milestones of Iran's Nuclear Programme*. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/05/major-milestones-iran-nuclear-programme-180508105047809.html>.

The Nuclear Threat Initiative (NTI). 2018. *Nuclear Iran*. Diakses melalui <https://www.nti.org/learn/countries/iran/nuclear/>.

The World Factbook.Middle East:Iran. Central Intelligence Agency. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ir.html>.

United Nations Office For Disarmament Affairs.*Nuclear Weapon*. Diakses melalui <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/>.

United Nations Security Council Resolutions. 2006. *Resolution 1696: Non-Proliferation*. Diakses melalui <http://unscr.com/en/resolutions/1696#>.

Weisman, S.R and Nazila Fati. 2006. *Iranian Reopen Nuclear Centers*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2006/01/11/world/middleeast/iranians-reopen-nuclear-centers.html?mtrref=www.google.com&gwh=23290007D9498D958BD4AA024C81D421&gwt=pay>.

Wilkin,S. 2015. *Iran Considered Nuclear Weapons During 1980s Iraq War, ex-president says*. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-rafsanjani/iran-considered-nuclear-weapons-during-1980s-iraq-war-ex-president-says-idUSKCN0SNOE720151029>.

World Nuclear News. 2018. *Middle East Nuclear Power to Quadruple in Ten Years*. Diakses melalui <http://www.world-nuclear-news.org/NP-Middle-East-nuclear-power-to-quadruple-in-ten-years-06031801.html>.

Zeidan, A. 2019. *Hasan Rouhani: President of Iran*. Diakses melalui <https://www.britannica.com/biography/Hassan-Rouhani>.

Euroape Parliament. 2015. *Document of Joint Comprehensive Plan of Action*. Diakses melalui www.europarl.europa.eu › cmsdata › full-text-of-the-iran-nuclear-deal.

Thomas, Edbrink.2015. *Iran Nuclear Deal Wins Tepid Endorsement From Ayatollah Ali Khamenei*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2015/10/22/world/middleeast/iran-nuclear-deal-ayatollah-ali-khamenei.html>